



PEMERINTAH KOTA SALATIGA

LAPORAN KEUANGAN

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH
KOTA SALATIGA**

TAHUN ANGGARAN 2024

(AUDITED)

DAFTAR ISI DAN SISTEMATIKA LAPORAN KEUANGAN DINKOP UKM

DAFTAR ISI DAN SISTEMATIKA LAPORAN KEUANGAN DINKOP UKM	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan	5
BAB II.....	7
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	7
2.1. Ekonomi Makro	7
2.2 Kebijakan Keuangan	11
2.2.2. Kebijakan Anggaran Belanja Daerah	11
2.2.3. Kebijakan Anggaran Pembiayaan	11
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	11
BAB III	13
IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN	13
3.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah	13
3.1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024	13
3.1.2. Permasalahan yang Dihadapi	13
3.2 Pengelolaan Belanja Daerah	13
3.2.1 Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.....	13
BAB IV.....	15
KEBIJAKAN AKUNTANSI	15
4.1 Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan	15
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	15
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	15
4.3.1 Pengukuran Aset	15
4.3.2 Pengukuran Kewajiban	20
4.3.3 Pengukuran Ekuitas.....	21
4.3.4 Pengukuran Pendapatan LRA	21
4.3.5 Pengukuran Belanja dan Beban.....	22
4.3.6 Pengukuran Hibah	23
BAB V	24
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	24
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	24
5.1.1 Penjelasan Pos-pos Pendapatan Rp.0,00	24
5.1.2 Penjelasan Pos-Pos Belanja Rp.7.054.579.169,00	24
5.1.2.3 Belanja Tak Terduga	30
5.1.2.4 Transfer	30
5.1.3 Penjelasan Pembiayaan	30
5.2 Penjelasan Pos-pos Neraca	31
5.2.1 Aset Rp. 5.229.800.469,15	31
5.2.2 Kewajiban Rp.833.402,00.....	66

5.2.3	Ekuitas Rp.5.228.449.237,67	66
5.3	Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional	67
5.3.1	Kegiatan Operasional	67
5.3.2	Kegiatan Non Operasional (Rp.587.757.178,05).....	71
5.3.3	Pos Luar Biasa Rp.0,00	72
5.3.4	Surplus/Defisit LO (Rp.7.110.736.867,96).....	72
5.4	Penjelasan Pos-pos laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....	72
5.4.1	Ekuitas Awal Rp.5.285.124.766,11.....	72
5.4.2	Surplus/Defisit LO (Rp.7.110.736.867,96).....	73
5.4.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp.0,00 Penjelasan atas dampak kumulatif perubahan kebijakan dalam Pos Lain-Lain sebesar Rp.0,00 (nol rupiah). 74	
5.4.4	Akun untuk Dikonsolidasikan Rp.7.054.579.169,00.....	74
5.4.5	Ekuitas Akhir Rp.5.228.967.067,15	74
BAB VI	75
INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	75
6.1	Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	75
6.2	Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	81
6.3	Informasi Non Keuangan Lainnya	84
BAB VII	85
PENUTUP	85

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Audited Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan M Kota Salatiga yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; (d) Neraca; dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Salatiga,

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH
KOTA SALATIGA

Dr. BAYU JOKO MULYONO, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19750402 200312 1 008



BAB I **PENDAHULUAN**

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, disusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 yang berupa Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Keuangan terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). LRA merupakan laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan. Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. LO merupakan laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dalam satu periode pelaporan. LPE yaitu laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas satu periode. CaLK merupakan penjelasan naratif atas LRA, Neraca, LO, dan LPE, CaLK juga menyajikan informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang digunakan oleh Pemkot Salatiga sebagai dasar penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TA 2024. CaLK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemkot Salatiga TA 2024. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan Pemkot Salatiga secara keseluruhan.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga telah menyusun Laporan Keuangan dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang relevan dan bermanfaat mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga selama satu periode pelaporan yang berupa informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; perubahan posisi sumber daya ekonomi; kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; ketaatan realisasi terhadap anggarannya; cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan Pemkot Salatiga disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah serta perencanaan pembangunan daerah, terdiri atas:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah UU tentang Keuangan Negara. UU ini mengatur tentang pengelolaan keuangan negara, termasuk perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Kota Salatiga, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sidorejo, Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan daerah Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Persediaan;
20. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 40 Tahun 2020;
21. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 16 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
22. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 90 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah;



23. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga;
24. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan;
25. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran;
26. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 3 Tentang Neraca;
27. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 4 Tentang Laporan Arus Kas;
28. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 5 Tentang Catatan Atas Laporan Keuangan;
29. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 6 Tentang Akuntansi pendapatan;
30. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 7 Tentang Belanja dan Beban;
31. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 8 Tentang Akuntansi Pembiayaan;
32. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 9 Tentang Akuntansi Aset;
33. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 10 Tentang Akuntansi Kewajiban;
34. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 11 Tentang Akuntansi Ekuitas;
35. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 12 Tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan;
36. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 13 Tentang Laporan Keuangan Konsolidasi;
37. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 14 Tentang Laporan Operasional;
38. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 15 Tentang Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (LPSAL);
39. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 17 Tentang Perjanjian Jasa Konsesi-Pemberi Konsesi;
40. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 18 Tentang Akuntansi Properti Investasi;
41. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 19 Tentang Peristiwa Setelah Tanggal Neraca;
42. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 76 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Anggaran;
43. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 77 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pendapatan;
44. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 78 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Beban dan Belanja;
45. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 79 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Transfer;



46. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pembiayaan;
47. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 81 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Kas dan Setara Kas;
48. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 82 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Piutang;
49. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 83 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Persediaan;
50. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 84 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Investasi;
51. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 85 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Aset Tetap;
52. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 86 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud;
53. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 87 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Dana Cadangan;
54. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 88 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Aset Lainnya;
55. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 89 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Kewajiban;
56. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 90 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan;
57. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 91 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Konsolidasian;
58. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 92 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Konsesi Jasa; dan
59. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 93 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Properti Investasi.
60. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
61. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2024;
62. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 33 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
63. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
64. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
65. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Bagan Akun Standar;
66. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 47 Tahun 2024.



1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.2.1 Kebijakan Anggaran Pendapatan
 - 2.2.2 Kebijakan Anggaran Belanja
 - 2.2.3 Kebijakan Anggaran Pembiayaan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Capaian target Kinerja Keuangan

- 3.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 3.1.1 Target dan Realisasi Pendapatan
 - 3.1.2 Permasalahan yang dihadapi
- 3.2 Pengelolaan Belanja Daerah
 - 3.2.1 Target dan Realisasi Belanja
 - 3.2.2 Permasalahan yang dihadapi

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3.1 Pengukuran Aset
 - 4.3.2 Pengukuran Kewajiban
 - 4.3.3 Pengukuran Ekuitas
 - 4.3.4 Pengukuran Pendapatan LRA
 - 4.3.5 Pengukuran Belanja
 - 4.3.6 Pengukuran Pendapatan LO
 - 4.3.7 Pengukuran Beban

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Pos-pos LRA
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Pembiayaan
- 5.2. Penjelasan Pos-pos Neraca
 - 5.2.1 Aset
 - 5.2.2 Kewajiban
 - 5.2.3 Ekuitas
- 5.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
 - 5.3.1 Kegiatan Operasional
 - 5.3.2 Kegiatan Non Operasional
 - 5.3.3 Pos Luar Biasa
 - 5.3.4 Surplus/Defisit LO



5.4. Penjelasan Pos-pos LPE

- 5.4.1 Ekuitas Awal
- 5.4.2 Surplus/Defisit LO
- 5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar
- 5.4.4 Ekuitas Akhir

Bab VI Informasi Non Keuangan

- 6.1 Organisasi dan Tata Kerja SKPD
- 6.2 Rencana Strategis SKPD
- 6.3 Informasi Non Keuangan Lainnya

Bab VII Penutup



BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian Kota Salatiga pada masa ini relatif baik. Data ekonomi makro Kota Salatiga Tahun 2024 dengan kondisi perekonomian yang relatif baik ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 sebesar 5,53 persen. Pertumbuhan Tahun 2022 meningkat sedikit jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2021 yang besarnya 3,35 persen. Kategori yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 51 persen. Hal ini berbeda dari Tahun 2022, dimana sektor yang mengalami pertumbuhan terbesar adalah Informasi dan Komunikasi sebesar 6,31 persen. Data jumlah penduduk Kota Salatiga pada tahun 2023 sebanyak 200.738 jiwa, jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 200.220 jiwa, maka mengalami pertumbuhan jumlah penduduk sebanyak 518 jiwa atau 0,26 persen. Pada tahun 2023, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 99.623 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 101.115 jiwa. Rasio jenis kelamin sebesar 98,52 persen artinya penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki, menurun sebesar 0,08 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar 98,60 persen.

Data jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin di Kota Salatiga tahun 2021-2023, dapat disajikan sebagai berikut:

	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)			Rasio Jenis Kelamin (%)
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
	2021	97.382	99.058	196.440	98,31
	2022	99.403	100.817	200.220	98,60
	2023	99.623	101.115	200.738	98,52
	2024				

Garis kemiskinan menjadi ukuran yang paling berpengaruh terhadap perubahan jumlah penduduk miskin. Kenaikan garis kemiskinan jika tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat maka akan berdampak pada kenaikan jumlah penduduk miskin. Untuk itu perlu ada penekanan dalam menghadapi tren atau kenaikan garis kemiskinan dengan mendorong program dan kegiatan sektor riil yang menyentuh langsung kepada masyarakat dengan kategori berpenghasilan rendah. Garis Kemiskinan Tahun 2023 sebesar Rp565.031,00 mengalami kenaikan Rp46.216,00 dibanding tahun 2022 sebesar Rp518.815,00. Tren garis kemiskinan Kota Salatiga dapat disajikan sebagai berikut:

No	Tahun	Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp)
1	2021	480.903,00
2	2022	518.815,00
3	2023	565.031,00
4		



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Capaian IPM Kota Salatiga selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2021-2023. Pada Tahun 2023 IPM Kota Salatiga sebesar 84,99 mengalami peningkatan sebesar 0,64 dari tahun 2022 sebesar 84,35. Capaian IPM Kota Salatiga dalam kurun waktu tahun 2021-2023 dapat disajikan sebagai berikut:

No	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)
1	2021	83,60
2	2022	84,35
3	2023	84,99
4	2024	

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT Kota Salatiga tahun 2023 sebesar 4,57 persen mengalami penurunan sebesar 1,01 persen dari tahun 2022 sebesar 5,58 persen. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka dapat disajikan sebagai berikut:

No	Tahun	Angka Pengangguran (%)
1	2021	7,26
2	2022	5,58
3	2023	4,57
4	2024	

Salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam suatu periode dapat digambarkan dari Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Analisis Pertumbuhan PDRB merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi. Melalui dinamika dari berbagai kegiatan ekonomi yang ada, akan dapat diidentifikasi karakteristik wilayah berikut potensi-potensi dan kelemahan yang memerlukan perhatian demi kemajuan wilayah yang semakin baik dimasa mendatang. Berdasarkan data BPS Ekonomi Jawa Tengah tahun 2023 tercatat mengalami



pertumbuhan positif yaitu sebesar 4,98 persen, melambat dibandingkan capaian tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,31 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan meliputi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,24 persen. Informasi dan Komunikasi sebesar 10,67 persen dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,12 persen. Kemudian, keempat lapangan usaha yang memiliki peran dominan juga mencatatkan pertumbuhan positif diantaranya Industri Pengolahan tumbuh sebesar 4,31 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor tumbuh sebesar 4,98 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 0,49 persen dan Konstruksi tumbuh sebesar 6,03 persen. Lapangan usaha lainnya yang juga tumbuh positif di antaranya Jasa lainnya sebesar 7,41 persen, Jasa Perusahaan sebesar 7,24 persen; dan Real Estate sebesar 6,90. Tingkat Inflasi gabungan 6 Kota di Jawa Tengah di angka 2,98 % Pada tahun 2022, jumlah PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan sebesar Rp10.365,31 (dalam miliar rupiah) mengalami peningkatan sebesar Rp54,31 (dalam miliar rupiah) atau 0,55 persen jika dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp9.822,00 (dalam miliar rupiah).

Kontribusi tertinggi PDRB ADHK menurut lapangan usaha pada sektor industri pengolahan sebesar Rp3.092,87 (dalam miliar rupiah). Sedangkan kontribusi terendah pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp2,94 (dalam miliar rupiah). Data PDRB ADHK tahun dasar 2010 menurut lapangan usaha Kota Salatiga Tahun 2020-2022 dapat disajikan sebagai berikut:

kategori	Uraian	2020	2021	2022
a	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	419,01	430,02	445,45
b	Pertambangan dan Penggalian	3,36	3,27	2,94
c	Industri Pengolahan	2.831,44	2.957,06	3.092,87
d	Pengadaan Listrik dan Gas	21,96	23,08	24,56
e	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	7,77	7,87	8,15
f	Konstruksi	1.288,95	1.299,23	1.312,76
g	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.310,22	1.380,39	1.436,36
h	Transportasi dan Pergudangan	251,54	259,35	391,62
i	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	730,71	762,77	872,57
j	Informasi dan Komunikasi	514,41	546,88	558,13
k	Jasa Keuangan dan Asurans	333,74	337,29	339,17
l	Real Estat	508,42	519,27	544,72
m/n	Jasa Perusahaan	115,67	119,39	126,15
o	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	467,89	476,44	487,32
p	Jasa Pendidikan	436,68	436,81	443,5
q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	161,98	162,41	167,56
r,s,t,u	Jasa Lainnya	99,88	100,49	111,47
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	9.503,71	9.822,00	10.365,31

Walaupun perekonomian Kota Salatiga dalam kondisi baik, namun berbagai tantangan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Kota Salatiga masih ada antara lain:

1. Tertundanya penyelesaian beberapa pembangunan infrastruktur strategis;
2. Masih besarnya ketergantungan penerimaan daerah dari sumber dana perimbangan;



3. Kondisi perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional maupun perekonomian global;
4. Tuntutan untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif;
5. Pengaruh fluktuasi ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Melihat potensi, peluang dan tantangan yang dihadapi maka kebijakan ekonomi makro Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2023 diarahkan pada peningkatan pendapatan perkapita melalui pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, penanggulangan kemiskinan serta pengurangan pengangguran. Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang semakin positif sesuai dengan target yang telah direncanakan, dengan memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional serta kebijakan ekonomi Jawa Tengah, kebijakan diarahkan pada peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah sehingga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas dapat dicapai. Upaya yang dilakukan antara lain melalui:

1. Pengembangan sarana prasarana perekonomian daerah;
2. Konektivitas antara pusat pertumbuhan ekonomi tinggi dengan rendah dengan meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur yang semakin baik;
3. Meningkatkan daya saing produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah/Industri Kecil Menengah (UMKM / IKM) berbahan baku lokal;
4. Peningkatan akses pasar dan promosi bagi potensi unggulan di daerah;
5. Peningkatan iklim usaha kondusif terutama bagi investasi yang menyerap tenaga kerja yang mendukung ekonomi kerakyatan;
6. Peningkatan kelancaran arus distribusi barang kelompok kebutuhan masyarakat dan barang strategis serta kelompok jasa.

Arah dan skema dari kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi adalah mengenai upaya optimalisasi pengelolaan dan pendayagunaan potensi daya lokal melalui:

1. Pemanfaatan sumber daya alam yang mampu menghasilkan nilai ekonomi sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
2. Pelibatan dan peningkatan daya saing Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) dengan menekankan produk unggulan daerah serta produk industri unggulan daerah serta produk industri kreatif Kota Salatiga;
3. Pengembangan sistem pemasaran hasil produk unggulan daerah serta produk industri kreatif Kota Salatiga;
4. Peningkatan program kemitraan, sarana dan prasarana pendukung dalam rangka pembentukan wirausaha baru;
5. Peningkatan peran dan layanan koperasi, lembaga jasa keuangan.

Kebijakan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik serta mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui:

1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi investor;
2. Pengembangan produk unggulan daerah dan kewirausahaan untuk mendorong daya saing;
3. Peningkatan nilai tambah barang dan jasa yang berorientasi pada pengembangan produk dan pendapatan petani;



4. Melanjutkan pembangunan dan revitalisasi infrastruktur wilayah;
5. Pengembangan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang memiliki daya saing.

2.2 Kebijakan Keuangan

APBD Kota Salatiga TA 2024 sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, disusun berdasarkan pendekatan kinerja dengan mengutamakan pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023–2026. Secara umum kebijakan keuangan daerah difokuskan pada pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan. meliputi:

2.2.1. Kebijakan Anggaran Pendapatan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga menetapkan arah kebijakannya dalam hal anggaran pendapatan, mengingat sebagai SKPD Penghasil memiliki pendapatan.

2.2.2. Kebijakan Anggaran Belanja Daerah

Belanja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah disusun berdasarkan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan pengelolaan belanja diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawabnya, dengan memperhatikan bahwa peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap bidang harus terukur. Dalam pelaksanaan anggaran tetap memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran antara lain transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran.

2.2.3. Kebijakan Anggaran Pembiayaan

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Realisasi Belanja Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp.7.054.579.169,00 (tujuh milyar lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) atau sebesar 96,32 % bila dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp.7.323.999.115,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh tiga juta



sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima belas rupiah) Belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi berupa Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa.
2. Belanja Modal berupa Belanja Peralatan dan mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Tetap Aset lainnya

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp.6.625.483.915,00 (enam milyar enam ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah), terealisasi sebesar Rp.6.364.586.169,00 (enam milyar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) atau sebesar 96,06%. Untuk Belanja Modal yang dianggarkan sebesar Rp. 698.515.200,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) yang terealisasi sebesar Rp.689.993.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) atau sebesar 98,78%.



BAB III IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dinas Koperasi, UKM Kota Salatiga tidak ada pengelolaan Pendapatan Daerah

3.1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

Target dan realisasi untuk Pendapatan Dinas Koperasi, UKM Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024 tidak ada karena tidak mengelola Pendapatan Daerah

3.1.2. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang di hadapi untuk Pendapatan Dinas Koperasi, UKM Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024 tidak ada karena tidak mengelola Pendapatan Daerah

3.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Pengelolaan Belanja Daerah Dinas Koperasi, UKM Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024 meliputi Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan keuangan daerah

3.2.1 Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Laporan Target dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 Dinas Koperasi, UKM Kota Salatiga dapat dilihat sebagai berikut:

Target dan Realisasi Belanja Tahun 2024 terdiri dari:

Belanja Daerah

Target	: Rp.7.323.999.115,00
Realisasi	: Rp.7.054.579.169,00
Prosentase	: 96,32 %

Terdiri dari :

a. Belanja Operasi

Target	: Rp.6.625.483.915,00
Realisasi	: Rp.6.364.586.169,00
Prosentase	: 96,06 %

Belanja Operasi Terdiri dari:

1). Belanja Pegawai

Target	: Rp.3.497.874.815,00
Realisasi	: Rp.3.317.318.341,00
Prosentase	: 94,84 %

2). Belanja Barang dan Jasa

Target	: Rp.3.127.609.100,00
Realisasi	: Rp.3.047.267.828,00
Prosentase	: 97,43 %



b. Belanja Modal

Target	: Rp.698.515.200,00
Realisasi	: Rp.689.993.000,00
Prosentase	: 98,78 %

Belanja Modal Terdiri dari :

- 1) Belanja Peralatan dan Mesin

Target	: Rp.115.013.200,00
Realisasi	: Rp.109.790.000,00
Prosentase	: 95,46 %
- 2) Belanja Belanja Gedung dan Bangunan

Target	: Rp.583.502.000,00
Realisasi	: Rp.580.203.000,00
Prosentase	: 99,43 %
- 3) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Target	: Rp.0,00
Realisasi	: Rp.0,00
Prosentase	: 00,00 %
- 4) Belanja Aset Lainnya

Target	: Rp.0,00
Realisasi	: Rp.0,00
Prosentase	: 00,00 %

3.2.2 Permasalahan yang Dihadapi

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana, dan penyerapan anggaran sebesar sebesar Rp.7.054.579.169,00 (tujuh milyar lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) atau sebesar 96,32 % dari total anggaran Rp.7.783.105.983,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima belas rupiah)

Terdapat beberapa kegiatan yang penyerapannya cukup rendah tetapi pencapaian indikator kinerja sebesar 100%. Hal ini dikarenakan efisiensi seperti pada penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan logistik kantor, jasa surat menyurat, jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, serta pemeliharaan kendaraan operasional/lapangan.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan

Entitas Akuntansi merupakan unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sedangkan Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan.

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, menjadi dasar Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ditetapkan menjadi Entitas Akuntansi. Sebagai entitas pelaporan adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang dalam hal ini adalah Badan Keuangan Daerah (BKD).

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Pemkot Salatiga adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dalam LRA, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari laporan keuangan adalah sebagai berikut:

4.3.1 Pengukuran Aset

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- b. Klasifikasi

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset non lancar :

- 1) Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.
- 2) Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, biaya dibayar di muka, dan persediaan.
- 3) Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset non lancar meliputi aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Entitas Pelaporan atau yang digunakan masyarakat umum

- c. Pengukuran Aset



- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Setara Kas adalah bagian dari Aset Lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu satu sampai tiga bulan tanpa menghadapi resiko. Kas dan Setara Kas diukur dan dinilai sebesar nilai nominal;
- 2) Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga seperti saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar nilai perolehan;
- 3) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang dicatat sebesar jumlah nominal yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan/atau berdasarkan SKPD/SKPKDB/SKRD/SKRDKB/SPTPD/SPTRD yang telah diterbitkan. Pengakuan Piutang yang berasal dari Pendapatan Daerah diawali dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut. Untuk dapat diakui sebagai Piutang harus dipenuhi kriteria telah diterbitkan surat ketetapan, telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, telah dilakukan pengajuan permohonan klaim biaya pelayanan kepada entitas/instansi/organisasi di atasnya atau pihak ketiga dan/atau telah diterbitkan rincian biaya pelayanan pasien. Piutang Transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang dinilai sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.
- 4) Penyisihan piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang.
 - a) Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) maupun yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (*official assessment*) ditetapkan sebagai berikut :

No	Kriteria Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan Piutang
1	Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun	Lancar	0,50%
2	Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun	Kurang lancar	10%
3	Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun	Diragukan	50%
4	Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun	Macet	100%



b) Penggolongan kriteria kualitas Piutang Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

No.	Kriteria Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan Piutang
1.	Umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) bulan.	Lancar	0,50%
2.	Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan.	Kurang Lancar	10%
3.	Umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.	Diragukan	50%
4.	Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan.	Macet	100%

c) Penggolongan kriteria kualitas Piutang Selain Piutang Pajak dan Piutang Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

No.	Kriteria Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan Piutang
1.	Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.	Lancar	0,50%
2.	Apabila dalam jangka 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan.	Kurang Lancar	10%
3.	Apabila dalam jangka 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan.	Diragukan	50%
4.	Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.	Macet	100%

- 5) Beban Dibayar Dimuka (*prepaid expenses*), diukur sebesar jumlah nilai beban yang belum terealisasi/manfaatnya belum diterima oleh pemerintah daerah;
- 6) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diukur dan dicatat sebesar:
 - a) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan



- c) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti hibah. Metode penilaian persediaan menggunakan cara *First In First Out (FIFO)* dengan dasar harga beli. Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali.
- 7) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut maksud investasinya, yaitu permanen dan non permanen.
- Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, dan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Investasi Permanen dapat berupa penyertaan modal entitas pelaporan pada badan usaha milik daerah dan investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh entitas pelaporan untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:
- a) Dengan Menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Metode ini di gunakan apabila kepemilikan kurang dari 20%.
- b) Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap, Metode ini di gunakan apabila :
- 1) kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi
 - 2) memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - 3) kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Metode kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
- 8) Dana bergulir dinilai berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Perkiraan dana bergulir diragukan tertagih sesuai dengan jatuh tempo atau *aging schedule*.



No.	Masa Dana Bergulir	Kategori	Cadangan Kerugian Dana Bergulir (%)
1.	<5 (lima) tahun	Dapat ditagih	25%
2.	>5 (lima) tahun s.d. 7 (tujuh) tahun	Diragukan ditagih	50%
3.	>7 (tujuh) tahun	Tidak dapat ditagih	100%

- 9) Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
- digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau:
 - dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.
- Properti investasi diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerjasama atau berita acara serah terima (BAST) atau surat ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria:
- besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
- Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap yang berlaku.
- c) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Penambahan masa manfaat dalam hal terdapat perbaikan Aset Tetap yang jumlah total masa manfaat (nilai buku Aset Tetap) melebihi umur ekonomis Aset Tetap maka masa manfaat Aset Tetap sama dengan umur ekonomis Aset Tetap. Dalam proses kapitalisasi biaya pada Aset tetap diterapkan kebijakan mengenai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap (*capitalization*)



threshold) yang mengatur batas minimum pengeluaran yang dapat ditambahkan ke dalam nilai tercatat aset tetap diatur sebagai berikut:

- i. Peralatan dan Mesin yang dibeli mempunyai manfaat ekonomi lebih dari 12 (dua belas) bulan dan perolehan barang tersebut dipergunakan untuk operasional dan pelayanan serta tidak untuk dijual dengan nilai barang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke atas per satuan barang.
- ii. Gedung dan Bangunan yang dibeli mempunyai manfaat ekonomi lebih dari 12 (dua belas) bulan dan perolehan barang tersebut dipergunakan untuk operasional dan pelayanan serta tidak untuk dijual dengan nilai barang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke atas per satuan barang. Semua barang belanja modal yang mempunyai manfaat ekonomi lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan nilai satuan barang dibawah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetap dicatat sebagai aset dan termasuk dalam barang extra comptable sehingga tidak dicatat di dalam neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, alat peraga untuk proses belajar mengajar, tanaman keras, dan aset renovasi.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional (LO). Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Masa manfaat diatur dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 9 tentang Akuntansi Aset

- d) Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset lainnya diukur sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan. Aset lainnya terdiri dari tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, aset lain-lain, akumulasi amortisasi aset tidak berwujud dan akumulasi penyusutan aset lainnya.

4.3.2 Pengukuran Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi dari Pemerintah Daerah.
- b. Kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - 1) Kewajiban jangka pendek diukur sebesar jumlah yang harus dibayarkan atau jumlah kas yang diterima atau jumlah belanja/beban yang diakui atau jumlah utang jangka panjang yang direklasifikasi menjadi utang jangka pendek. Kewajiban Jangka Pendek dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan



dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

- 2) Kewajiban Jangka Panjang diukur sebesar jumlah pokok kewajiban atau utang yang harus dibayarkan oleh pemerintah daerah pada saat jatuh tempo.

4.3.3 Pengukuran Ekuitas

- a. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.
- b. Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran aset dan kewajiban. Hal ini dikarenakan ekuitas merupakan nilai bersih hasil pengurangan aset dengan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal neraca. LPE menyajikan pos-pos:
 - 1) Ekuitas Awal;
 - 2) Surplus/defisit-LO;
 - 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas; dan
 - 4) Ekuitas Akhir.

4.3.4 Pengukuran Pendapatan LRA

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- c. Pendapatan diakui:
 - 1) pada saat diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
 - 2) diterima oleh OPD; atau
 - 3) diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.
- d. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - 1) timbulnya hak atas pendapatan atau timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan atau timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - 2) direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi atas pendapatan atau adanya hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
- e. Untuk Badan Layanan Umum Daerah sebagai entitas akuntansi, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
- f. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.
- g. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah



dikompensasikan dengan pengeluaran). Pencatatan asas *bruto* dapat dikecualikan dalam hal besaran pengurang terhadap jenis pendapatan bersifat *variable*.

4.3.5 Pengukuran Belanja dan Beban

- a. Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- c. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- d. Pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pada entitas akuntansi pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
- e. Beban diakui pada saat:
 - 1) terjadinya konsumsi barang/jasa:
 - a. pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban;
 - b. konsumsi barang/jasa non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
 - 2) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
 - 3) timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan tanpa harus diikuti keluarnya kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar entitas akuntansi.
- f. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pada entitas pelaporan pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (BUD/Kuasa BUD).
- g. Pengeluaran belanja dicatat sebesar Kas yang dikeluarkan dari RKUD. Pengeluaran belanja dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan. Apabila dalam berita acara serah terima tersebut tidak dicantumkan nilai barang dan atau jasanya maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan atau jasa yang bersangkutan.
- h. Beban diukur sebesar:
 - 1) Jumlah Kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan.
 - 2) Jumlah biaya periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang.
 - 3) Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas biaya yang telah dikeluarkan.

4.3.6 Pengukuran Hibah

- a. Penerimaan Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan Hibah dalam anggaran pendapatan daerah termasuk bagian dari lain-lain pendapatan daerah dan bersifat tidak mengikat.
- c. Belanja Hibah didefinisikan sebagai pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.
- d. Pengakuan Pendapatan Hibah diakui pada saat timbulnya hak untuk memperoleh pendapatan tersebut walaupun kas belum diterima di RKUD atau pada saat:
 - 1) Pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik;
 - 2) Besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih; dan
 - 3) Jumlahnya dapat diestimasi secara andal.
- e. Pendapatan Hibah-LO diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Apabila pemberi Hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang jika entitas penerima Hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka pendapatan Hibah diakui pada saat entitas penerima Hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.
 - 2) Apabila pemberi Hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka:
 - a. Terhadap pemberian Hibah yang didasari oleh perjanjian antara pemberi dan penerima Hibah, maka Pendapatan Hibah diakui setelah timbulnya hak yang ditandai dengan perjanjian hibah ditandatangani.
 - b. Ada pemberi hibah mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka Pendapatan Hibah diakui pada saat dana hibah/barang tersebut diterima berdasarkan Berita Acara Serah Terima.
- f. Pendapatan Hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak. Sedangkan Pendapatan Hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan berita acara serah terima, dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar.
- g. Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk barang/jasa dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
- h. Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh Pemberi Hibah dan Pemerintah Daerah untuk dicatat di dalam LKPD.
- i. Belanja Hibah dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah.
- j. Disamping disajikan pada LRA dan LO, transaksi hibah juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada CaLK sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan belanja hibah yang diterima/dikeluarkan.



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan posisi Realisasi Anggaran 2024 mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan dan perbandingannya dengan Realisasi Anggaran 2024 dengan uraian sebagai berikut:

5.1.1 Penjelasan Pos-pos Pendapatan Rp.0,00

Dinas Koperasi, UKM bukan OPD Penghasil, sehingga tidak ada pendapatan

5.1.2 Penjelasan Pos-Pos Belanja

Rp.7.054.579.169,00

Realisasi belanja Dinas Koperasi, UKM per 31 Desember 2024 sebesar Rp.7.054.579.169,00 (tujuh milyar lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) atau sebesar 96,32 % dari total anggaran Rp.7.323.999.115,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima belas rupiah) di tahun 2024. Dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp.7.165.825.748,00 (tujuh milyar seratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) realisasi belanja tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp.269.419.946,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) atau 3,82 %. Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Realisasi Belanja Tahun 2024 dan 2023

No	Belanja	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Operasi	6.625.483.915,00	6.364.586.169,00	96,06	6.543.869.748,00
2	Belanja Modal	698.515.200,00	689.993.000,00	98,78	621.956.000,00
3	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	7.323.999.115,00	7.054.579.169,00	96,32	7.165.825.748,00

5.1.2.1 Belanja Operasi

Rp.6.364.586.169,00

Total realisasi belanja operasi per 31 Desember tahun 2024 adalah Rp.6.364.586.169,00 (enam milyar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) atau 96,06 % dari jumlah anggaran yang ditetapkan yaitu Rp.6.625.483.915,00 (enam milyar enam ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah). Dibandingkan dengan tahun 2023, sebesar Rp. 6.543.869.748,00 (enam milyar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) realisasi belanja tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp.260.897.746,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) atau 4,10%.

Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:



Tabel 4. Belanja Operasi Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024		%	2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	3.497.874.815,00	3.317.318.341,00	94,84	2.967.892.851,00
2	Belanja Barang dan Jasa	3.127.609.100,00	3.047.267.828,00	97,43	3.575.976.897,00
	Jumlah	6.625.483.915,00	6.364.586.169,00	96,06	6.543.869.748,00

Rincian penjelasan:

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Rp.3.317.318.341,00

Belanja pegawai per 31 Desember 2024 sebesar Rp.3.317.318.341,00 (tiga milyar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) atau 94,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.497.874.815,00 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah). Dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp. 2.967.892.851,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp.349.425.490,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) atau 10,53 %.

Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024		%	2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Gaji dan Tunjangan ASN	1.781.750.427,00	1.714.781.504,00	96,24	1.476.650.590,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	1.673.543.388,00	1.582.536.837,00	94,56	1.435.404.261,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN (Honorarium)	42.581.000,00	20.000.000,00	46,97	55.838.000,00
	Total Belanja Pegawai	3.497.874.815,00	3.317.318.341,00	94,84	2.967.892.851,00

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Rp.3.047.267.828,00

Belanja Barang dan jasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp.3.047.267.828,00 (tiga milyar empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) dari jumlah yang dianggarkan Rp.3.127.609.100,00 (tiga milyar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu seratus rupiah) atau 97,43 %. Dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp.3.575.976.897,00 tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh



tujuh rupiah) mengalami penurunan sebesar Rp. 528.709.069,00 (lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan ribu enam puluh sembilan rupiah) atau 14,79 %.

Untuk lebih jelasnya uraian tersebut dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6. Tabel Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	2024		%	2023
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		REALISASI (Rp)
BELANJA BARANG DAN JASA				
a. Belanja Barang	737.633.852,00	721.541.710,00	97,82	1.533.357.221,00
Belanja Bahan Habis Pakai	737.633.852,00	721.541.710,00	97,82	1.533.357.221,00
b. Belanja Jasa	1.533.027.427,00	1.488.053.850,00	97,07	1.631.332.027,00
Belanja Jasa Kantor	685.832.795,00	652.187.449,00	95,09	318.705.808,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	45.727.632,00	38.829.401,00	84,91	23.838.219,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	189.056.000,00	188.926.000,00	99,93	52.840.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	300.675.000,00	297.325.000,00	98,89	146.682.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	-	-	-	114.816.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	36.136.000,00	36.136.000,00	100	974.450.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	275.600.000,00	274.650.000,00	99,66	-
c. Belanja Pemeliharaan	250.767.368,00	245.525.084,00	97,91	151.248.250,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	59.500.000,00	57.601.700,00	96,81	40.900.500,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	191.267.368,00	187.923.384,00	98,25	110.347.750,00
d. Belanja Perjalanan Dinas	606.180.453,00	592.147.184,00	97,68	260.039.399,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	606.180.453,00	592.147.184,00	97,68	260.039.399,00
Jumlah	3.127.609.100,00	3.047.267.828,00	97,43	3.575.976.897,00

5.1.2.2 Belanja Modal

Rp.689.993.000,00

Total realisasi belanja modal per 31 Desember 2024 sebesar Rp.689.993.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) atau 98,78 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 698.515.200,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu dua ratus rupiah). Dibandingkan dengan tahun 2023 yang realisasinya sebesar Rp.621.956.000,00



(enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) mengalami kenaikan sebesar Rp.68.037.000,00 enam puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) atau 10,94 %

Belanja modal tahun 2024 ini terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	2024		%	2023
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		REALISASI (Rp)
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.013.200,00	109.790.000,00	94,46	6.400.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	71.217.200,00	67.700.000,00	95,46	-
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	9.500.000,00	7.800.000,00	82,11	6.400.000,00
Belanja Modal Komputer	34.296.000,00	34.290.000,00	99,98	-
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	583.502.000,00	580.203.000,00	99,43	615.556.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	393.502.000,00	390.903.000,00	99,34	615.556.000,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	190.000.000,00	189.300.000,00	99,63	-
Jumlah	698.515.200,00	689.993.000,00	98,78	621.956.000,00

Penjelasan dari belanja modal adalah:

5.1.2.2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Rp.109.790.000,00

Realisasi belanja modal peralatan mesin pada tahun 2024 sebesar Rp.109.790.000,00 (seratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari anggaran sebesar Rp.115.013.200,00 (seratus lima belas juta tiga belas ribu dua ratus rupiah) atau 95,46 %. Dibandingkan dengan tahun 2023 yang realisasi anggarannya sebesar Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), maka mengalami kenaikan sebesar Rp.103.390.000,00 (seratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau 1.615,47 %. Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:



Tabel 8. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan 2023

No	JENIS BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	2024		%	2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		REALISASI (Rp)
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	71.217.200,00	67.700.000,00	95,06	0,00
2	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	9.500.000,00	9.500.000,00	82,11	6.400.000,00
3	Belanja Modal Komputer	34.296.000,00	34.296.000,00	82,11	0,00
JUMLAH		115.013.200,00	109.790.000,00	95,46	6.400.000,00

Rincian Penjelasan atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 Tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 9. Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2024 dan 2023

REALISASI 2024			REALISASI 2023				
No	Uraian		Jumlah (Rp)	No	Uraian		Jumlah (Rp)
1	4 unit	Kursi Tunggu	7.600.000,00				
2	6 unit	Rak Buku Satu Sisi	18.300.000,00				
3	1 unit	AC Panasonic 1,5 PK CS/CU-PN12WKJ	9.300.000,00				
4	2 unit	AC Panasonic 2 PK CS/CU-PN18WKJ	24.000.000,00				
5	2 unit	Dispenser Hydra Galon Bawah PWC 776	5.700.000,00				
6	1 unit	Mesin pemotong rumput gendong Tac 328e	2.800.000,00				
Total Belanja			67.700.000,00				0,00

Tabel 10. Realisasi Belanja Modal Alat Studio Tahun 2024 dan 2023

REALISASI 2024			REALISASI 2023				
No	Uraian		Jumlah (Rp)	No	Uraian		Jumlah (Rp)
1.	1 unit	Canon EOS 3000D DSLR Camera with 18-55mm Lens	7.800.000,00	1	2 unit	Clip on Micropone	5.400.000,00
				2	2 unit	Stand Mic	1.000.000,00
Total Belanja			7.800.000,00				6.400.000,00

Tabel 11. Realisasi Belanja Modal Komputer Tahun 2024 dan 2023

REALISASI 2024			REALISASI 2023				
No	Uraian		Jumlah (Rp)	No	Uraian		Jumlah (Rp)
1.	3 unit	MyBook Pro 107 (8S9)	34.290.000,00				
Total Belanja			34.290.000,00				0,00



5.1.2.2.2. Belanja Gedung dan Bangunan Rp.580.203.000,00

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan tahun 2024 adalah Rp.580.203.000,00 (lima ratus delapan puluh juta dua ratus tiga ribu rupiah) dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp.583.502.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua ribu rupiah) atau 99,43%. Dibandingkan dengan tahun 2023 realisasi anggarannya sebesar Rp.615.556.000,00 (enam ratus lima belas juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) mengalami penurunan sebesar Rp.35.353.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) atau 5,74 %. Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 12. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023

No	JENIS BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	2024		%	2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		REALISASI (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	393.502.000,00	390.903.000,00	99,34	615.556.000,00
2	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	190.000.000,00	189.300.000,00	99,63	0,00
JUMLAH		583.502.000,00	580.203.000,00	99,98	615.556.000,00

Rincian Penjelasan atas Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 Tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 13. Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Tahun 2024 dan 2023

REALISASI 2024			REALISASI 2023		
No	Uraian	Jumlah (Rp)	No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Rehabilitasi Gedung Dekopinda)	196.103.000,00	1	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	199.000.000,00
2	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum (Rehabilitasi Bangunan Shelter)	194.800.000,00	2	Belanja Modal Bangunan Shelter (pertokoan)	416.556.000,00
Total Belanja		390.903.000,00			615.556.000,00

Tabel 14. Realisasi Modal Tugu/Tanda Batas Tahun 2024 dan 2023

REALISASI 2024			REALISASI 2023		
No	Uraian	Jumlah (Rp)	No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Modal Pagar	189.300.000,00			0,00
Total Belanja		189.300.000,00			0,00



5.1.2.3 Belanja Tak Terduga **Rp.0,00**
Belanja Tak Terduga Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga senilai Rp.0,00 (nol rupiah).

5.1.2.4 Transfer **Rp.0,00**
Transfer Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga senilai Rp.0,00 (nol rupiah).

5.1.3 Penjelasan Pembiayaan

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan **Rp.0,00**
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga tidak memiliki anggaran pembiayaan atau senilai Rp.0,00 (nol rupiah).

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan **Rp.0,00**
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga tidak memiliki pengeluaran pembiayaan atau senilai Rp.0,00 (nol rupiah).

5.1.3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran **(Rp7.054.579.169,00)**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada 31 Desember 2024 sebesar (Rp.7.054.579.169,00) (minus tujuh milyar lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).



5.2 Penjelasan Pos-pos Neraca

5.2.1 Aset

Rp. 5.229.800.469,15

Total aset yang dimiliki Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp.5.229.800.469,15 (lima milyar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh sembilan koma lima belas rupiah). Dibandingkan dengan tahun 2023 aset yang dimiliki sebesar Rp.5.287.570.768,11 (lima milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus enam puluh delapan koma sebelas rupiah) dan mengalami penurunan sebesar Rp.57.770.298,96 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan koma sembilan puluh enam rupiah) atau 1,09 %. Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 15. Aset Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Naik/ Turun (Rp)
Aset Lancar	34.328.124,98	594.295.476,69	(559.967.351,71)
Aset Tetap	3.447.831.374,92	2.968.605.833,13	479.225.541,79
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Aset Lainnya	149.655.611,45	156.627.288,53	(6.971.677,08)
Properti Investasi	1.597.985.357,80	1.568.042.169,76	29.943.188,04
Total Aset	5.229.800.469,15	5.287.570.768,11	(57.770.298,96)

Berikut kami sajikan rincian atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya:

5.2.1.1 Aset Lancar

Rp. 34.328.124,98

Tabel 16. Aset Lancar Tahun 2024 dan 2023

JENIS	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Naik/ Turun (Rp)
Aset Lancar	34.328.124,98	594.295.476,69	(559.967.351,71)

Tabel tersebut di atas menunjukkan jumlah keseluruhan Aset Lancar per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp.34.328.124,98 (tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh empat koma sembilan puluh delapan rupiah) dibandingkan dengan tahun 2023 keseluruhan aset lancar sebesar Rp.594.295.476,69 (lima ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh enam koma enam puluh sembilan rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp.559.967.351,71 (minus lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh satu koma tujuh puluh satu rupiah) atau 94,22%. Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:



Tabel 17. Aset Lancar Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Naik/ Turun (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	525.471.420,00	(525.471.420,00)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.154.180.319,00	1.351.793.619,00	(-197.613.300,00)
Cadangan Kerugian Piutang	(1.154.180.319,00)	(1.298.317.069,00)	144.136.750,00
Belanja Dibayar Dimuka	22.062.624,98	12.393.306,69	9.669.318,29
Persediaan	12.265.500,00	2.954.200,00	9.311.300,00
Jumlah Aset Lancar	34.328.124,98	594.295.476,69	(559.967.351,71)

Penjelasan masing-masing rincian adalah sebagai berikut:

5.2.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.0,00

Kas di bendahara Pengeluaran

Rekening gaji 3033193148

Rp.0,00 (nol rupiah).

Rekening bend Pengeluaran 2033199476

Rp.0,00 (nol rupiah).

5.2.1.1.2 Kas Lainnya Rp.0,00

Kas lainnya merupakan saldo kas yang tersimpan di rekening Dana Bergulir pada Bank BPR BKK Jateng (Perseroda) Sidorejo dan BPR Salatiga. Kas Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah). Dibandingkan dengan tahun 2023 Kas lainnya yang dimiliki sebesar Rp. 525.471.420,00 (lima ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah). dan mengalami penurunan sebesar Rp. 525.471.420,00 (lima ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah) atau 100%. Rekening Dana Bergulir pada Bank BPR BKK Jateng (Perseroda) Sidorejo dan BPR Salatiga sesuai dengan rekomendasi BPK telah dilakukan Penutupan pada tanggal 27 Juni 2024. Adapaun besar saldo rekening pada saat dilakukan penutupan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 18. Kas Lainnya

No	Keterangan	27 Juni 2024 (Rp.)	31 Desember 2023 (Rp.)
1	BPR BKK Jateng (Perseroda) Sidorejo	421.544.123,00	327.499.148,00
	Pokok BLU DB - 006202001355	374.740.179,00	281.576.122,00
	Bunga BLU DB - 006202001030	4.612.398,00	4.001.675,00
	Administrasi BLU DB - 006202001029	42.191.546,00	41.921.351,00



No	Keterangan	27 Juni 2024 (Rp.)	31 Desember 2023 (Rp.)
2	BPR Salatiga	206.839.798,00	197.972.272,00
	Pokok BLU DB - 10.003381	134.961.311,00	127.021.560,00
	Bunga BLU DB - 10.007353	38.737.065,00	38.187.288,00
	Administrasi BLU DB - 10.007354	33.141.422,00	32.763.424,00
	Total :	628.383.921,00	525.471.420,00

Berdasarkan tabel di atas, Penjelasan Saldo akhir penutupan tanggal 27 Juni 2024 dapat dirinci berdasarkan nomor rekening sebagai berikut:

1) Rekening Pokok BLU DB pada Bank BPR BKK Jateng (Perseroda)

Tabel 19. Rekening Pokok BLU pada Bank BPR BKK Jateng

Nomor Rekening		: 006202001355					
Nama Nasabah		: POKOK BLU DB					
				Saldo	31 Des 2023 :		281.576.122,00
No	Bulan	Setoran	Bunga	Pajak	Adm Bulanan	Penarikan tunai	Saldo
1	Januari	-	469.294,00	93.859,00	2.000,00		281.949.557,00
2	Februari	15.663.500,00	469.916,00	93.983,00	2.000,00		297.986.990,00
3	Maret	-	496.645,00	99.329,00	2.000,00		298.382.306,00
4	April	53.893.800,00	497.304,00	99.461,00	2.000,00		352.671.949,00
5	Mei	19.600.000,00	587.787,00	117.557,00	2.000,00		372.740.179,00
6	Juni	2.000.000,00				374.740.179,00	-
7	Juli						-
8	Agustus						-
9	September						-
10	Oktober	-					-
11	November	-					-
12	Desember						-
		91.157.300,00	2.520.946,00	504.189,00	10.000,00		

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Setoran

Rp. 91.157.300,00

Merupakan penambahan saldo yang berasal dari debitur yang melakukan angsuran pinjaman dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 20. Angsuran pinjaman pada Rekening Pokok BLU Bank BPR BKK Jateng

No	Tgl	Nama Debitur	Pokok Pinjaman	Bunga Pinjaman	Denda	Jumlah
1	1-Feb-2024	KSP Artha Ananda	10.413.500,00	1.250.000,00		11.663.500,00
2	2-Feb-2024	KSU Astha Sejahtera	1.000.000,00	-		1.000.000,00
3	2-Feb-2024	Dwi Mulyoto	500.000,00	-		500.000,00
4	16-Feb-2024	Moh. Machrus	2.500.000,00	-		2.500.000,00
5	5-Apr-2024	KSU Putra Jaya	49.199.800,00	4.694.000,00		53.893.800,00
6	13-May-2024	Tri Joewanto	17.500.000,00	2.100.000,00		19.600.000,00
7	26-Jun-2024	Didik Suradi	1.700.000,00	300.000,00		2.000.000,00
Total			82.813.300,00	8.344.000,00		91.157.300,00



b. Bunga

Rp. 2.520.946,00

Merupakan Penambahan saldo yang berasal dari pendapatan bunga atas uang kas yang tersimpan di rekening Bank dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 21. Bunga Simpanan Pada Rekening Pokok BLU Bank BPR BKK Jateng

No	Bulan	Bunga
1	Januari	469.294,00
2	Februari	469.916,00
3	Maret	496.645,00
4	April	497.304,00
5	Mei	587.787,00
6	Juni	-
		2.520.946,00

c. Pajak

Rp. 504.189,00

Merupakan Pengurangan saldo karena pajak yang dibebankan oleh bank kepada pemegang rekening atas bunga simpanan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 22. Pajak atas Bunga Simpanan pada Bank BPR BKK Jateng

No	Bulan	Pajak
1	Januari	93.859,00
2	Februari	93.983,00
3	Maret	99.329,00
4	April	99.461,00
5	Mei	117.557,00
6	Juni	-
		504.189,00

d. Administrasi Bulanan

Rp. 10.000,00

Merupakan Pengurangan saldo karena biaya administrasi yang dibebankan oleh bank kepada pemegang rekening dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 23. Biaya Administrasi Rekening Pokok BLU Bank BPR BKK Jateng

No	Bulan	Adm
1	Januari	2.000,00
2	Februari	2.000,00
3	Maret	2.000,00
4	April	2.000,00
5	Mei	2.000,00
6	Juni	-
		10.000,00



2) Rekening Bunga BLU DB pada Bank BPR BKK Jateng (Perseroda)

Tabel 24. Rekening Bunga BLU pada Bank BPR BKK Jateng

Nomor Rekening		: 006202001030					
Nama Nasabah		: BUNGA BLU DB					
				Saldo	31 Des 2023 :		4.001.675,00
No	Bulan	denda	Bunga	Pajak	Adm Bulanan	Penarikan tunai	Saldo
1	Januari		6.669,00	1.334,00	2.000,00		4.005.010,00
2	Februari		6.675,00	1.335,00	2.000,00		4.008.350,00
3	Maret		6.681,00	1.336,00	2.000,00		4.011.695,00
4	April		6.686,00	1.337,00	2.000,00		4.015.044,00
5	Mei	594.000,00	6.692,00	1.338,00	2.000,00		4.612.398,00
6	Juni					4.612.398,00	-
7	Juli						-
8	Agustus						-
9	September						-
10	Oktober						-
11	November						-
12	Desember						-
		594.000,00	33.403,00	6.680,00	10.000,00		

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Denda

Rp. 594.000,00

Merupakan penambahan saldo yang berasal dari debitur yang melakukan pelunasan dengan dikenakan denda pinjaman dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 25. Pembayaran Denda Pinjaman pada Bank BPR BKK Jateng

No	Tgl	Nama Debitur	Pokok Pinjaman	Bunga Pinj	Denda	Jumlah
1	13-May-2024	Tri Joewanto			594.000,00	594.000,00
Total						594.000,00

b. Bunga

Rp. 33.403,00

Merupakan Penambahan saldo yang berasal dari pendapatan bunga atas uang kas yang tersimpan di rekening Bank dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 26. Bunga Simpanan Pada Rekening Bunga BLU Bank BPR BKK Jateng

No	Bulan	Bunga
1	Januari	6.669,00
2	Februari	6.675,00
3	Maret	6.681,00
4	April	6.686,00
5	Mei	6.692,00
6	Juni	-
		33.403,00

c. Pajak

Rp. 6.680,00

Merupakan Pengurangan saldo karena pajak yang dibebankan oleh bank kepada pemegang rekening atas bunga simpanan dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 27. Pajak atas Bunga Simpanan pada Bank BPR BKK Jateng

No	Bulan	Pajak
1	Januari	1.334,00
2	Februari	1.335,00
3	Maret	1.336,00
4	April	1.337,00
5	Mei	1.334,00
6	Juni	-
		6.680,00

d. Adminitrasi Bulanan

Rp. 10.000,00

Merupakan Pengurangan saldo karena biaya administrasi yang dibebankan oleh bank kepada pemegang rekening dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 28. Biaya Administrasi Rekening Bunga BLU pada Bank BPR BKK Jateng

No	Bulan	Adm
1	Januari	2.000,00
2	Februari	2.000,00
3	Maret	2.000,00
4	April	2.000,00
5	Mei	2.000,00
6	Juni	-
		10.000,00

3) Rekening Administrasi BLU DB pada Bank BPR BKK Jateng (Perseroda)

Tabel 29. Rekening Administrasi BLU pada Bank BPR BKK Jateng

Nomor Rekening	: 0062202001029						
Nama Nasabah	: ADMINISTRASI PROVISI BLUDB						
			Saldo	31 Des 2023 :			41.921.351,00
No	Bulan	Saldo masuk	Bunga	Pajak	Adm Bulanan	Keterangan	Saldo
1	Januari		69.869,00	13.974,00	2.000,00		41.975.246,00
2	Februari		69.959,00	13.992,00	2.000,00		42.029.213,00
3	Maret		70.049,00	14.010,00	2.000,00		42.083.252,00
4	April		70.139,00	14.028,00	2.000,00		42.137.363,00
5	Mei		70.229,00	14.046,00	2.000,00		42.191.546,00
6	Juni					42.191.546,00	-
7	Juli						-
8	Agustus						-
9	September						-
10	Oktober						-
11	November						-
12	Desember						-
		-	350.245,00	70.050,00	10.000,00		

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bunga

Rp. 350.245,00

Merupakan Penambahan saldo yang berasal dari pendapatan bunga atas uang kas yang tersimpan di rekening Bank dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 30. Bunga Simpanan Pada Rekening Admin BLU Bank BPR BKK Jateng

No	Bulan	Bunga
1	Januari	69.869,00
2	Februari	69.959,00
3	Maret	70.049,00
4	April	70.139,00
5	Mei	70.229,00
6	Juni	-
		350.245,00

b. Pajak

Rp. 70.050,00

Merupakan Pengurangan saldo karena pajak yang dibebankan oleh bank kepada pemegang rekening atas bunga simpanan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 31. Pajak atas Bunga Simpanan Pada Rekening Admin Bank BPR BKK Jateng

No	Bulan	Pajak
1	Januari	13.974,00
2	Februari	13.992,00
3	Maret	14.010,00
4	April	14.028,00
5	Mei	14.046,00
6	Juni	-
		70.050,00

c. Adminitrasi Bulanan

Rp. 10.000,00

Merupakan Pengurangan saldo karena biaya administrasi yang dibebankan oleh bank kepada pemegang rekening dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 32. Biaya Administrasi Pada Rekening Admin Bank BPR BKK Jateng

No	Bulan	Adm
1	Januari	2.000,00
2	Februari	2.000,00
3	Maret	2.000,00
4	April	2.000,00
5	Mei	2.000,00
6	Juni	-
		10.000,00



4) Rekening Pokok BLU DB Pada BPR Bank Salatiga

Tabel 33. Rekening Pokok BLU pada Bank BPR Salatiga

Nomor Rekening		: 10.006381					
Nama Nasabah		: POKOK BLU DB					
				Saldo	31 Des 2023 :	127.021.560,00	
No	Bulan	Setoran	Bunga	Pajak	Adm Bulanan	Penarikan tunai	Saldo
1	Januari	1.026.700,00	431.525,00	86.305,00	-	-	128.393.480,00
2	Februari	3.983.400,00	431.525,00	86.305,00	-	-	132.722.100,00
3	Maret	-	409.142,00	81.828,00	-	-	133.049.414,00
4	April	833.600,00	452.003,00	90.401,00	-	-	134.244.616,00
5	Mei	-	438.612,00	87.722,00	-	-	134.595.506,00
6	Juni	-	457.256,00	91.451,00	-	134.961.311,00	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-
		5.843.700,00	2.620.063,00	524.012,00	-	-	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Setoran

Rp. 5.843.700,00

Merupakan penambahan saldo yang berasal dari debitur yang melakukan angsuran pinjaman dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 34. Angsuran Peminjam Pada Rekening Pokok BLU Bank BPR Salatiga

No	Tgl	Nama Debitur	Pokok Pinjaman	Bunga Pinjaman	Denda	Jumlah
1	10-Jan-2024	Chadijah Yanurita	1.026.700,00			1.026.700,00
2	5-Feb-2024	Tarsiwin	1.133.600,00	732.400,00		1.866.000,00
3	7-Feb-2024	Sugiarto	1.667.400,00	200.000,00		1.867.400,00
4	19-Feb-2024	Rr Wardimuktiati	250.000,00			250.000,00
5	29-Apr-2024	Sukarti	208.400,00			233.400,00
6	29-Apr-2024	Sukarti	208.400,00			233.400,00
7	29-Apr-2024	Sukarti	208.400,00			233.400,00
8	29-Apr-2024	Sukarti	208.400,00			233.400,00
Total			4.911.300,00	932.400,00	0,00	5.843.700,00

b. Bunga

Rp. 2.620.063,00

Merupakan Penambahan saldo yang berasal dari pendapatan bunga atas uang kas yang tersimpan di rekening Bank dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 35. Bunga Simpanan Pada Rekening Pokok BLU Bank BPR Salatiga

No	Bulan	Bunga
1	Januari	431.525,00
2	Februari	431.525,00
3	Maret	409.142,00
4	April	452.003,00
5	Mei	438.612,00
6	Juni	457.256,00
		2.620.063,00



c. Pajak

Rp. 524.012,00

Merupakan Pengurangan saldo karena pajak yang dibebankan oleh bank kepada pemegang rekening atas bunga simpanan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 36. Pajak atas Bunga Simpanan Pada Rekening Pokok BLU Bank BPR Salatiga

No	Bulan	Pajak
1	Januari	86.305,00
2	Februari	86.305,00
3	Maret	81.828,00
4	April	90.401,00
5	Mei	87.722,00
6	Juni	91.451,00
		524.012,00

5) Rekening Bunga BLU DB pada BPR Bank Salatiga

Tabel 37. Rekening Bunga BLU pada Bank BPR Salatiga

Nomor Rekening		: 10.007353							
Nama Nasabah		: BUNGA BLU DB							
				Saldo	31 Des 2023 :				38.187.288,00
No	Bulan	bunga denda angs	Bunga	Pajak	Adm Bulanan	Penarikan tunai	Saldo		
1	Januari	-	97.299,00	19.460,00	3.000,00	-	38.262.127,00		
2	Februari	-	97.299,00	19.460,00	3.000,00	-	38.336.966,00		
3	Maret	-	91.379,00	18.276,00	3.000,00	-	38.407.069,00		
4	April	100.000,00	97.859,00	19.572,00	3.000,00	-	38.582.356,00		
5	Mei	-	94.888,00	18.978,00	-	-	38.658.266,00		
6	Juni	-	98.499,00	19.700,00		38.737.065,00	-		
7	Juli	-				-	-		
8	Agustus	-				-	-		
9	September	-				-	-		
10	Oktober	-				-	-		
11	November	-				-	-		
12	Desember	-				-	-		
		100.000,00	577.223,00	115.446,00	12.000,00	38.737.065,00			

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bunga pinjaman

Rp. 100.000,00

Merupakan penambahan saldo yang berasal dari debitur yang melakukan angsuran bunga pinjaman dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 38. Bunga Pinjaman Pada Rekening Bunga BLU Bank BPR Salatiga

No	Tgl	Nama Debitur	Bunga	Jumlah
1	29-Apr-2024	Sukarti	25.000,00	25.000,00
2	29-Apr-2024	Sukarti	25.000,00	25.000,00
3	29-Apr-2024	Sukarti	25.000,00	25.000,00
4	29-Apr-2024	Sukarti	25.000,00	25.000,00
Total			100.000,00	100.000,00

b. Bunga

Rp. 577.223,00

Merupakan Penambahan saldo yang berasal dari pendapatan bunga atas uang kas yang tersimpan di rekening Bank dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 39. Bunga Simpanan Pada Rekening Bunga BLU Bank BPR Salatiga

No	Bulan	Bunga
1	Januari	97.299,00
2	Februari	97.299,00
3	Maret	91.379,00
4	April	97.859,00
5	Mei	94.888,00
6	Juni	98.499,00
		577.223,00

c. Pajak

Rp. 115.446,00

Merupakan Pengurangan saldo karena pajak yang dibebankan oleh bank kepada pemegang rekening atas bunga simpanan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 40. Pajak atas Bunga Simpanan Pada Rekening Bunga BLU Bank BPR Salatiga

No	Bulan	Pajak
1	Januari	19.460,00
2	Februari	19.460,00
3	Maret	18.276,00
4	April	19.572,00
5	Mei	18.978,00
6	Juni	19.700,00
		115.446,00

d. Administrasi Bulanan

Rp. 12.000,00

Merupakan Pengurangan saldo karena biaya administrasi yang dibebankan oleh bank kepada pemegang rekening dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 41. Biaya Admin Pada Rekening Bunga BLU Bank BPR Salatiga

No	Bulan	Adm
1	Januari	3.000,00
2	Februari	3.000,00
3	Maret	3.000,00
4	April	3.000,00
5	Mei	-
6	Juni	-
		12.000,00



6) Rekening Administrasi BLU DB BPR Bank Salatiga

Tabel 42. Rekening Administrasi BLU pada Bank BPR Salatiga

Nomor Rekening	: 10.0073354						
Nama Nasabah	: ADMINISTRASI PROVISI BLU-DB						
				Saldo	31 Des 2023 :		32.763.424,00
No	Bulan		Bunga	Pajak	Adm Bulanan	Penarikan tunai	Saldo
1	Januari	-	83.479,00	16.696,00	3.000,00	-	32.827.207,00
2	Februari	-	83.479,00	16.696,00	3.000,00	-	32.890.990,00
3	Maret	-	78.398,00	15.680,00	3.000,00	-	32.950.708,00
4	April	-	83.957,00	16.791,00	3.000,00	-	33.014.874,00
5	Mei	-	81.407,00	16.281,00	3.000,00	-	33.077.000,00
6	Juni	-	84.278,00	16.856,00	3.000,00	33.141.422,00	-
7	Juli	-				-	-
8	Agustus	-				-	-
9	September	-				-	-
10	Oktober	-				-	-
11	November	-				-	-
12	Desember	-				-	-
		-	494.998,00	99.000,00	18.000,00	-	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bunga

Rp. 494.998,00

Merupakan Penambahan saldo yang berasal dari pendapatan bunga atas uang kas yang tersimpan di rekening Bank dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 43. Bunga Simpanan Pada Rekening Admin BLU Bank BPR Salatiga

No	Bulan	Bunga
1	Januari	83.479,00
2	Februari	83.479,00
3	Maret	78.398,00
4	April	83.957,00
5	Mei	81.407,00
6	Juni	84.278,00
		494.998,00

b. Pajak

Rp. 99.000,00

Merupakan Pengurangan saldo karena pajak yang dibebankan oleh bank kepada pemegang rekening atas bunga simpanan dengan rincian sebagai berikut :

Tab 44. Pajak atas Bunga Simpanan Pada Rekening Admin BLU Bank BPR Salatiga

No	Bulan	Pajak
1	Januari	16.696,00
2	Februari	16.696,00
3	Maret	15.680,00
4	April	16.791,00
5	Mei	16.281,00
6	Juni	16.856,00
		99.000,00

c. Administrasi Bulanan

Rp. 18.000,00

Merupakan Pengurangan saldo karena biaya administrasi yang dibebankan oleh bank kepada pemegang rekening dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 45. Biaya Admin Pada Rekening Admin BLU Bank BPR Salatiga

No	Bulan	Adm
1	Januari	3.000,00
2	Februari	3.000,00
3	Maret	3.000,00
4	April	3.000,00
5	Mei	3.000,00
6	Juni	3.000,00
		18.000,00

Bahwa berdasarkan Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 175/S/XVIII.SMG/4/2024 tanggal 23 April 2024 Perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2023 bahwa Pengelolaan Dana Bergulir pada Dinas Koperasi UKM tidak optimal. Berdasarkan pembukuan dana bergulir Dinas Koperasi dan UKM diketahui bahwa jumlah saldo dana bergulir per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 525.471.420,00 (Lima ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah). BPK merekomendasikan Dinas Koperasi dan UKM untuk menyetorkan pendapatan dari Dana Bergulir yang masih tersimpan di rekening BPR BKK Jateng (Perseroda) dan BPR Bank Salatiga setelah memperhitungkan kewajiban yang harus dibayar oleh Pemkot Salatiga. Adapun penutupan rekening di jelaskan pada tabel berikut :

Tabel 46. Penutupan Rekening BLU Dana Bergulir

No	Rekening	Penarikan (Rp.)	Fee bank (Rp.)	Pengembalian atas kelebihan pembayaran (Rp.)	Disetorkan Ke kas Daerah (Rp.)
1	2	3	4	5	6 = 3-4-5
	BPR BKK Jateng (Perseroda) Sidorejo	421,544,123,00	2.529.750,00	-	419.014.373,00
1	Pokok BLU DB - 006202001355	374,740,179.00			
2	Bunga BLU DB - 006202001030	4,612,398.00			
3	Administrasi BLU DB - 006202001029	42,191,546.00			
	BPR Salatiga	206.839.798,00	1.464.350,00	933.600,00	.204.441.848,00
4	Pokok BLU DB - 10.003381	134.961.311,00			
5	Bunga BLU DB - 10.007353	38.737.065,00			
6	Administrasi BLU DB - 10.007354	33.141.422,00			
	Total :	628.383.921,00	3.994.100,00	933.600,00	623.456.221,00

Penjelasan masing-masing rincian adalah sebagai berikut:



1) Rekening pada BPR BKK Jateng (Perseroda)

Dilakukan penarikan dana pada rekening BLU Dana Bergulir pada BPR BKK Jateng (Perseroda) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 47. Penarikan Saldo pada rekening BLU Dana Bergulir pada BPR BKK Jateng

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nominal saldo (Rp)
1	006202001355	Pokok BLU DINKOP	374,740,179.00
2	006202001030	Bunga BLU DINKOP	4,612,398.00
3	006202001029	Administrasi Provisi BLU DINKOP	42,191,546.00
Total (Rp)			421,544,123.00

Penarikan Tunai sebesar Rp. 421.544.123,00 (empat ratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh tiga rupiah) Dirinci sebagai berikut :

- a. Membayar Fee Bank PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) sebesar Rp. 2.529.750,00 (dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Fee Bank merupakan bagian bunga sebanyak 1,5% (satu setengah perseratus) dari 6,0%(enam perseratus) flat atau 25,0% (dua puluh lima perseratus) dari bunga pinjaman yang masuk rekening Badan Layanan Umum Dana Bergulir (BLU DB) dari BPR BKK Jateng (Perseroda) sebagai bagian dari kerja sama dengan Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 48. Kewajiban Fee Bank PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)

No.	Tahun	Jumlah Fee (Rp)
1	2022	300.000,00
2	2023	143.750,00
3	2024	2.086.000,00
Total (Rp)		2.529.750,00

- b. Mengembalikan ke kas daerah melalui Surat Tanda Setoran Nomor 73.24.000112 tanggal 27 Juni 2024 sebesar Rp. 419.014.373,00 (empat ratus sembilan belas juta empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah)

2) Rekening pada BPR Bank Salatiga

Dilakukan penarikan dana pada rekening BLU Dana Bergulir dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 49. Penarikan Saldo pada rekening BLU Dana Bergulir pada BPR Bank Salatiga

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nominal saldo (Rp)
1	10.006381	Pokok BLU-DB	134.961.311,00
2	10.007353	Bunga BLU-DB	38.737.065,00
3	10.007354	Administrasi Provisi BLU-DB	33.141.422,00
Total (Rp)			206.839.798,00



Penarikan Tunai sebesar Rp. 206.839.798,00 (dua ratus enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) Dirinci sebagai berikut :

- a. Membayar Fee Bank P.D. BPR Bank Salatiga Sebesar Rp. 1.464.350,00 (satu juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Fee Bank merupakan bagian bunga sebanyak 1,5% (satu setengah perseratus) dari 6,0%(enam perseratus) flat atau 25,0% (dua puluh lima perseratus) dari bunga pinjaman yang masuk rekening Badan Layanan Umum Dana Bergulir (BLU DB) dari BPR Bank Salatiga sebagai bagian dari kerja sama dengan Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 50. Kewajiban Fee Bank P.D. BPR Bank Salatiga

No.	Tahun	Jumlah Fee (Rp)
1	2022	1.081.250,00
2	2023	150.000,00
3	2024	233.100,00
Total (Rp)		1.464.350,00

- b. Mengembalikan kelebihan pembayaran atas angsuran a.n Sukarti sebesar Rp.933.600,00 (Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan Berita Acara Nomor 500.3.4.6/096/BA/2024 tanggal 27 Juni 2024.
- c. Mengembalikan ke kas daerah melalui Surat Tanda Setoran Nomor 73.24.000111 tanggal 27 Juni 2024 sebesar Rp. 204.441.848,00 (dua ratus empat juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).

5.2.1.1.3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Rp. 1.154.180.319,00

Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan nilai Piutang yang terdiri atas Piutang Pinjaman Bergulir yang dikelola oleh Dinas Koperasi, UKM Kota Salatiga yang diharapkan kembali dalam jangka waktu beberapa tahun. Saldo Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.154.180.319,00 (satu milyar seratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) turun sebesar Rp. 197.613.300,00 (minus seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah) atau (14,62%) dibandingkan per 31 Desember 2023 yaitu Rp. 1.351.793.619,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan belas rupiah) dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 51. Piutang Dana Bergulir Tahun 2024

No	Jenis Piutang	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo 31 Desember 2023(Rp)	Naik/ Turun (Rp)
1	Piutang Pinjaman Bergulir BLUD	564.730.167,00	762.343.467,00	(197.613.300,00)
2	Piutang Pinjaman Dana Bergulir	343.628.500,00	343.628.500,00	-
3	Piutang Pinjaman Tidak Bergulir	245.821.652,00	245.821.652,00	-
Total Piutang		1.154.180.319,00	1.351.793.619,00	(197.613.300,00)



Piutang Lain-lain PAD sebesar Rp.1.154.180.319,00 (satu milyar seratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) Dirinci sebagai berikut :

1. Piutang Pinjaman Bergulir BLUD Rp . 564.730.167,00

Tabel 52. Penurunan Piutang Pinjaman Bergulir BLUD Tahun 2024

No	Jenis Piutang	Turun (Rp)	Keterangan
1	Angsuran Pokok periode Januari s.d Juni 2024	86.891.000,00	Angsuran melalui BPR BKK Jateng (Perseroda) Sidorejo dan BPR Salatiga (rekening koran terlampir)
2	Angsuran Pokok periode Juli s.d Desember 2024	42.023.100,00	Angsuran melalui Dinkop UKM yang langsung di setorkan Ke kas Daerah (STS terlampir)
3	Rekonsiliasi atas piutang dana bergulir sampai dengan 31 Desember 2024	68.699.200,00	Hasil rekonsiliasi data pinjaman (Surat pernyataan terlampir)
	Total Penurunan Piutang	(197.613.300,00)	

Penjelasan penurunan Piutang Dana Bergulir Tahun 2024 sebesar Rp. 197.613.300,00 (minus seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah) dirinci sebagai berikut :

1) Angsuran Pokok periode Januari s.d Juni 2024

Merupakan Angsuran dari peminjam dana bergulir yang di bayar pada periode tanggal 1 januari sampai dengan 27 Juni 2024. Pada periode ini, peminjam melakukan pembayaran melalui bank penyalur (BPR BKK Jateng Sidorejo dan BPR Salatiga). Berikut rincian pembayaran pada periode tersebut :

Tabel 53. Penurunan Pokok Pinjaman Pokok periode Januari s.d Juni 2024

No	Tanggal	Nama Debitur	Pokok Pinjaman (Rp.)	Bank Penyalur
1	1-Feb-2024	KSP Artha Ananda	10.413.500,00	BPR BKK Jateng (Perseroda) Sidorejo
2	2-Feb-2024	KSU Astha Sejahtera	1.000.000,00	BPR BKK Jateng (Perseroda) Sidorejo
3	2-Feb-2024	Dwi Mulyoto	500.000,00	BPR BKK Jateng (Perseroda) Sidorejo
4	16-Feb-2024	Moh. Machrus	2.500.000,00	BPR BKK Jateng (Perseroda) Sidorejo
5	5-Apr-2024	KSU Putra Jaya	49.199.800,00	BPR BKK Jateng (Perseroda) Sidorejo
6	13-May-2024	Tri Joewanto	17.500.000,00	BPR BKK Jateng (Perseroda) Sidorejo
7	26-Jun-2024	Didik Suradi	1.700.000,00	BPR BKK Jateng (Perseroda) Sidorejo
8	10-Jan-2024	Chadijah Yanurita	1.026.700,00	BPR Salatiga
9	5-Feb-2024	Tarsiwin	1.133.600,00	BPR Salatiga
10	7-Feb-2024	Sugiarto	1.667.400,00	BPR Salatiga
11	19-Feb-2024	Rr Wardimuktiati	250.000,00	BPR Salatiga
Total Penurunan Piutang			86.891.000,00	



2) Angsuran Pokok periode Juli s.d Desember 2024

Merupakan Angsuran dari peminjam dana bergulir yang di bayar pada periode tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2024. Pada periode ini, peminjam melakukan pembayaran melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang kemudian disetorkan langsung ke kas Daerah. Berikut rincian pembayaran pada periode tersebut :

Tabel 54. Penurunan Pokok Pinjaman Pokok periode Juli s.d Desember 2024

No	Nama Debitur	Pokok Pinjaman (Rp.)	Keterangan
1	KSU Wahana Karya	200.000	STS Terlampir
2	KSU Astha Sejahtera	1.000.000	STS Terlampir
3	Rahmat Riyanto	5.750.000	STS Terlampir
4	Dwi Mulyoto	500.000	STS Terlampir
5	Didik Suradi	1.900.000	STS Terlampir
6	Moh. Machrus	2.000.000	STS Terlampir
7	Sholikun	800.000	STS Terlampir
8	Moch Rencong	1.000.000	STS Terlampir
9	Tarsiwin	300.400	STS Terlampir
10	Lilis Yuwanawati	8.000.000	STS Terlampir
11	Chadiyah Yanurita	10.906.300	STS Terlampir
12	Hariyanti	3.000.000	STS Terlampir
13	Sobirin	6.666.400	STS Terlampir
Total		42.023.100,00	

3) Rekonsiliasi piutang dana bergulir sampai dengan 31 Desember 2024

Merupakan hasil rekonsiliasi data antara bank penyalur, peminjam dan dinas koperasi UKM terkait selisih catat bank pengakuan atas piutang dana bergulir sampai dengan 31 Desember 2024.

Tabel 55. Penurunan Piutang Sesudah Rekonsiliasi piutang dana bergulir

No	Nama Peminjam	Piutang Sebelum Rekonsiliasi (Rp.)	Piutang Sesudah Rekonsiliasi (Rp.)	Selisih Saldo Piutang (Rp.)	Ket
1	Amirul Mukmin	2.079.000	0	(2.079.000)	Berita Acara terlampir
2	Dwi Rahayu S.	1.250.000	0	(1.250.000)	Berita Acara terlampir
3	Eni Dewi Budiyanti	580.000	0	(580.000)	Berita Acara terlampir
4	Farida Setyaningrum	5.011.600	0	(5.011.600)	Berita Acara terlampir
5	Sumartono	7.500.000	0	(7.500.000)	Berita Acara terlampir
6	Muirshid Dadiyanto	14.375.000	0	(14.375.000)	Berita Acara terlampir
7	Miftahul Huda (Q Ching)	1.166.000	0	(1.166.000)	Berita Acara terlampir
8	Tuti Kadariyah	6.450.000	0	(6.450.000)	Berita Acara terlampir



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama Peminjam	Piutang Sebelum Rekonsiliasi (Rp.)	Piutang Sesudah Rekonsiliasi (Rp.)	Selisih Saldo Piutang (Rp.)	Ket
9	Soediyarti	800.000	0	(800.000)	Berita Acara terlampir
10	Sanrina Mutiarawati	250.000	0	(250.000)	Berita Acara terlampir
11	Adi Winata	1.040.900	0	(1.040.900)	Berita Acara terlampir
12	Habib	375.000	0	(375.000)	Berita Acara terlampir
13	Eko Susilo	2.450.000	0	(2.450.000)	Berita Acara terlampir
14	Supiyon	8.332.400	0	(8.332.400)	Berita Acara terlampir
15	Muniri	624.200	0	(624.200)	Berita Acara terlampir
16	Rumah Makan Sederhana	4.000.000	0	(4.000.000)	Berita Acara terlampir
17	Munir	4.373.600	0	(4.373.600)	Berita Acara terlampir
18	Slamet Susanto	5.832.200	0	(5.832.200)	Berita Acara terlampir
19	Didik Suradi	900.000	1.900.000	1.000.000	Bukti Pembayaran Terlampir
20	Moh. Machrus	15.749.900	13.124.800	(2.625.100)	Bukti Pembayaran Terlampir
21	Moch Rencong	10.375.000	9.950.000	(425.000)	Bukti Pembayaran Terlampir
22	Hariyanti	9.666.100	9.999.400	333.300	Bukti Pembayaran Terlampir
23	Umiyatun	16.800.000	13.816.500	(2.983.500)	Bukti Pembayaran Terlampir
24	Tarsiwin	(600)	300.400	301.000	Bukti Pembayaran Terlampir
25	Chadijah Yanurita	10.716.300	10.906.300	190.000	Bukti Pembayaran Terlampir
26	Rahmat Riyanto	3.750.000	5.750.000	2.000.000	Bukti Pembayaran Terlampir
Total Penurunan Piutang				(68.699.200,00)	



2. Piutang Pinjaman Bergulir Rp. 343.628.500,00

Piutang Pinjaman Bergulir per 31 Desember 2024 sebesar Rp.343.628.500,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dibandingkan per 31 Desember 2023 tidak ada kenaikan atau penurunan.

3. Piutang Pinjaman Tidak Bergulir Rp. 245.821.652,00

Piutang Pinjaman Bergulir per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 245.821.652,00 (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dibandingkan per 31 Desember 2023 tidak ada kenaikan atau penurunan.

5.2.1.1.4 Cadangan Kerugian Piutang (Rp.1.154.180.319,00)

Cadangan Kerugian Piutang merupakan penyisihan piutang pinjaman bergulir BLUD, Pinjaman bergulir lama dan pinjaman tidak bergulir yang posisi per 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp. 1.154.180.319,00) (minus satu milyar seratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) turun sebesar Rp.144.136.750,00 (seratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dibanding awal Tahun 2024 sebesar (Rp.1.298.317.069,00) (minus satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu enam puluh sembilan rupiah). Rincian Cadangan kerugian Piutang adalah sebagai berikut:

Tabel 56. Cadangan Kerugian Piutang Tahun 2024

No	Cadangan Kerugian Piutang	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Naik/ Turun (Rp)
1	CKP Pinjaman Bergulir BLUD	(564.730.167,00)	(708.866.917,00)	(144.136.750,00)
2	CKP Pinjaman Dana Bergulir	(343.628.500,00)	(343.628.500,00)	0,00
3	Piutang Pinjaman Tidak Bergulir	(245.821.652,00)	(245.821.652,00)	0,00
	Total Cadangan Kerugian Piutang	(1.154.180.319,00)	(1.154.180.319,00)	(144.136.750,00)

5.2.1.1.4.1 Cadangan Kerugian Piutang Bergulir BLUD

Cadangan Kerugian Piutang dana bergulir untuk per 31 Desember 2024 ini adalah (Rp.564.730.167,00) (lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) turun sebesar Rp.144.136.750,00 (seratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dibanding awal Tahun 2024 sebesar Rp. 708.866.917,00 (tujuh ratus delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah). Hal ini di karena umur piutang BLU Dana bergulir lebih dari 5 tahun dan dinyatakan dengan 100 % macet dan



Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Salatiga telah melakukan beberapa tindak lanjut dalam penyelesaian piutang BLU Dana Bergulir tersebut, diantaranya sebagai berikut :

1. Melakukan monev peminjam dana bergulir
2. Menyampaikan teguran tertulis kepada peminjam
3. Melakukan komunikasi secara berkala terhadap peminjam

Adapun rincian jumlah Cadangan Kerugian Piutang (CKP) atas Piutang Pinjaman Bergulir BLUD sesuai dengan umur piutang adalah sebagai berikut:

Tabel 57. Cadangan Kerugian Piutang Bergulir BLUD Tahun 2024

Umur jatuh tempo Piutang	Piutang	Kategori	% Cadangan	Besarnya cadangan (Rp)
lebih dr 7 Tahun	487.564.967,00	Macet	100	487.564.967,00
6 Tahun	66.040.400,00	Macet	100	66.040.400,00
5 Tahun	11.124.800,00	Macet	100	11.124.800,00
4 Tahun	0,00	Diragu kan	50	0,00
3 Tahun	0,00	Diragu kan	50	0,00
2 Tahun	0,00	Kurang lancar	10	0,00
1 Tahun	0,00	Lancar	0.50	0,00
Jumlah	564.730.167,00			564.730.167,00

5.2.1.1.4.2 Cadangan Kerugian Piutang Bergulir

Cadangan Kerugian Piutang Pinjaman Bergulir lama per 31 Desember 2024 sebesar (Rp.343.628.500.00) (minus tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) nilainya sama dengan saldo awal Tahun 2023 sehingga tidak ada kenaikan maupun penurunan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 58. Cadangan Kerugian Piutang Bergulir Tahun 2024

No	Cadangan Kerugian Piutang	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Naik/ Turun (Rp)
1.	CKP Dana Bergulir	(343.628.500.00)	(343.628.500.00)	0,00
	Jumlah	(343.628.500.00)	(343.628.500.00)	0,00



5.2.1.1.4.3 Cadangan Kerugian Piutang Pinjaman Tidak Bergulir

Cadangan Kerugian Piutang Pinjaman tidak Bergulir per 31 Desember 2024 sebesar (Rp.245.821.652,00) (minus dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah). Cadangan Piutang Pinjaman tidak Bergulir nilainya sama dengan saldo 31 Desember 2023 sehingga tidak ada kenaikan maupun penurunan.

Tabel 59. Cadangan Kerugian Piutang Pinjaman tidak Bergulir Tahun 2024

No	Cadangan Kerugian Piutang	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Naik/ Turun (Rp)
1.	CKP Tidak Bergulir	(245.821.652,00)	(245.821.652,00)	0,00
	Jumlah	(245.821.652,00)	(245.821.652,00)	0,00

5.2.1.1.5 Belanja Dibayar Dimuka Rp. 22.062.624,98

Jumlah belanja dibayar dimuka sebesar Rp. 22.062.624,98 (dua puluh dua juta enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh empat koma sembilan puluh delapan rupiah). Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 60. Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2024

No	Kendaraan	Uraian	Premi 2024 (Rp)	Belanja Dibayar 2024 (beban) (Rp)	Belanja Dibayar Dimuka 2024 (Rp)
PREMI ASURANSI KENDARAAN DINAS			23.689.600,00	7.301.589,04	16.388.010,96
1	Premi asuransi kendaraan dinas Toyota Avanza G, Nomor Polisi H 9502 HK	Polis Asuransi Nomor : 12.400.0021.00286 Mulai tanggal 10 September 2024 (Pukul 12.00) s/d 10 September 2025 (Pukul 12.00) Waktu belaku Polis : 365 hari	5.783.500,00	1.782.585,62	4.000.914,38
2	Premi asuransi kendaraan dinas Toyota Avanza 1.3 G, Nomor Polisi H 1328 XB	Polis Asuransi Nomor : 12.400.0020.81166 10 September 2024 (Pukul 12.00) s/d 10 September 2025 (Pukul 12.00) Waktu belaku Polis : 365 hari	4.027.900,00	1.241.476,03	2.786.423,97
3	Premi asuransi kendaraan dinas Isuzu Pick Up Box nomor Polisi H 9583 AB	Polis Asuransi Nomor : 12.400.0012.82535 10 September 2024 (Pukul 12.00) s/d 10 September 2025 (Pukul 12.00) Waktu belaku Polis : 365 hari	3.358.750,00	1.035.231,16	2.323.518,84
4	Premi asuransi kendaraan dinas Toyota Rush 1.5 G,	Polis Asuransi Nomor : 12.400.0020.95413 Mulai tanggal	4.311.500,00	1.328.886,98	2.982.613,02



No	Kendaraan	Uraian	Premi 2024 (Rp)	Belanja Dibayar 2024 (beban) (Rp)	Belanja Dibayar Dimuka 2024 (Rp)
	Nomor Polisi H 1392 XB	10 September 2024 (Pukul 12.00) s/d 10 September 2025 (Pukul 12.00) Waktu belaku Polis : 365 hari			
5	Premi asuransi kendaraan dinas Mitsubishi Pajero Sport 2.8 HP-E (4x2), Nomor Polisi H 1242 XB	Polis Asuransi Nomor : 12.400.0021.09864 Mulai tanggal 10 September 2024 (Pukul 12.00) s/d 10 September 2025 (Pukul 12.00) Waktu belaku Polis : 365 hari	6.207.950,00	1.913.409,25	4.294.540,75
PREMI ASURANSI GEDUNG DAN BANGUNAN			7.154.522,00	1.479.907,98	5.674.614,02
1	Property All Risk Insurance / Asuransi Semua Risiko Harta Benda	Polis Asuransi Nomor : 12.400.0024.44420 Mulai tanggal 17 Oktober 2024 (Pukul 12.00) s/d 17 Oktober 2025 (Pukul 12.00) Waktu belaku Polis : 365 hari	3.766.441,45	779.085,84	2.987.355,61
2	Polis Asuransi Gempa Bumi	Polis Asuransi Nomor : 12.400.0024.44567 Mulai tanggal 17 Oktober 2024 (Pukul 12.00) s/d 17 Oktober 2025 (Pukul 12.00) Waktu belaku Polis : 365 hari	3.388.080,55	700.822,14	2.687.258,41
JUMLAH			30.844.122,00	8.781.497,02	22.062.624,98

5.2.1.1.6 Persediaan Rp.12.265.500,00

Saldo persediaan barang pakai habis sebesar Rp.12.265.500,00 (dua belas juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional per 31 Desember 2024 dengan rincian dalam tabel di bawah ini.

Tabel 61. Persediaan Barang Habis Pakai Tahun 2024

No	Jenis Persediaan	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akhir 2024 (Rp)
1	Bahan Bangunan Dan Konstruksi	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
2	Bahan Bakar Dan Pelumas	0,00	76.175.160,00	76.175.160,00	0,00
3	Isi Tabung Gas	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00
4	Bahan Lainnya	152.600,00	17.001.350,00	14.610.850,00	2.543.100,00



No	Jenis Persediaan	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akhir 2024 (Rp)
5	Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	4.330.000,00	4.330.000,00	0,00
6	Suku Cadang Lainnya	0,00	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00
7	Alat Tulis Kantor	649.700,00	13.723.500,00	11.690.500,00	2.682.700,00
8	Kertas Dan Cover	996.000,00	11.812.000,00	10.208.000,00	2.600.000,00
9	Bahan Cetak	621.800,00	52.751.550,00	52.306.050,00	1.067.300,00
10	Benda Pos	0,00	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00
11	Bahan Komputer	0,00	3.669.300,00	2.537.800,00	1.131.500,00
12	Alat Listrik	534.100,00	5.920.300,00	5.183.600,00	1.270.800,00
13	Suvenir/Cendera Mata	0,00	7.817.500,00	7.817.500,00	0,00
14	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	32.499.300,00	31.529.200,00	970.100,00
15	Dijual/Diserahkan Kepada	0,00	195.008.750,00	195.008.750,00	0,00
17	Natura Dan Pakan Lainnya	0,00	289.363.000,00	289.363.000,00	0,00
Jumlah Persediaan Barang Habis Pakai		2.954.200,00	721.541.710,00	712.230.410,00	12.265.500,00

Penjelasan persediaan barang habis pakai adalah sebagai berikut:

1) Bahan Lainnya Rp.2.543.100,00

Saldo awal persediaan Bahan Lainnya sebesar Rp.152.600,00 ditambah pembelian selama tahun 2024 sebesar Rp.17.001.350,00 dikurangi pemakaian selama tahun 2024 sebesar Rp.14.610.850,00 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp.2.543.100,00 dengan rincian saldo akhir sebagai berikut:

Tabel 62. Persediaan Bahan Lainnya Tahun 2024

No.	Nama Barang	Banyaknya		Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Kreolin wangi	18	Buah	12.600,00	226.800,00
2	Pembersih Lantai Vixal	6	Buah	12.600,00	75.600,00
3	Pembersih Lantai SOS	11	Buah	16.100,00	177.100,00
4	Cling Pembersih Kaca	2	Buah	12.000,00	24.000,00
5	Pembersih Kaca Besar	14	Buah	16.100,00	225.400,00
6	Tissu Tessa	48	Buah	20.200,00	969.600,00
7	Sabun Cair Reffil	5	Buah	31.300,00	156.500,00
8	Sabun Cuci Piring	11	Buah	30.300,00	333.300,00
9	Kit Wash & Glow	4	Buah	38.500,00	154.000,00
10	Tissu Roll	32	Buah	3.500,00	112.000,00
11	Baygon	2	Buah	44.400,00	88.800,00
					2.543.100,00



2) Alat Tulis Kantor

Rp.2.682.700,00

Saldo awal persediaan alat tulis kantor sebesar Rp.649.700,00 ditambah Pembelian selama tahun 2024 sebesar Rp.13.723.500,00, dikurangi pemakaian alat tulis kantor selama tahun 2024 sebesar Rp.11.690.500,00 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.682.700,00. dengan rincian saldo akhir sebagai berikut:

Tabel 63. Persediaan Alat Tulis Kantor Tahun 2024

No	Nama Barang	Banyaknya		Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Bak Stempel Tanggung	3	buah	7.500,00	22.500,00
2	Bak Stempel Besar	1	buah	20.200,00	20.200,00
3	Bak Stempel Kecil	2	buah	11.000,00	22.000,00
4	Bollpoint Boxy	15	pak	6.500,00	97.500,00
5	Perforator Besar	1	pak	70.600,00	70.600,00
6	Gunting Besar	1	buah	15.000,00	15.000,00
7	Gunting Tanggung	1	buah	8.500,00	8.500,00
8	Gunting Kecil	1	lembar	7.500,00	7.500,00
9	Stabilo	4	pak	12.000,00	48.000,00
10	Stick Note	3	pak	10.000,00	30.000,00
11	Tape Dispenser	1	buah	40.000,00	40.000,00
12	Isi Pensil Kenko	6	buah	2.000,00	12.000,00
13	Deil doble-sided Tape	2	buah	6.200,00	12.400,00
14	Lem Cair	3	amplop	3.500,00	10.500,00
15	Papper Clip no 5	4	pak	5.000,00	20.000,00
16	Penghapus Pensil	2	Buah	3.500,00	7.000,00
17	Pensil 2B	3	Buah	5.000,00	15.000,00
18	Rautan pensil	1	Dos	25.000,00	25.000,00
19	Spidol WB	1	Bendel	11.000,00	11.000,00
20	Spidol Permanen	1	pak	9.600,00	9.600,00
21	Steples HD 50	1	Pak	22.000,00	22.000,00
22	Steples HD 10	3	Pak	15.000,00	45.000,00
23	Stopmap Kertas	115	Buah	1.500,00	172.500,00
24	Snelhektek Folio	65	Buah	1.500,00	97.500,00
25	Snelhektek Plastik	15	buah	3.500,00	52.500,00
26	Binder Clip 225	4	Pak	15.100,00	60.400,00
27	Binder Clip 226	5	Pak	12.100,00	60.500,00
28	Binder Clip 260	4	Pak	17.500,00	70.000,00
29	Corextion Tape	6	Buah	8.500,00	51.000,00
30	Isolasi 1/2	1	Buah	5.000,00	5.000,00
31	Isolasi 1	2	Buah	10.000,00	20.000,00
32	Map Kancing 2	1	Pak	17.500,00	17.500,00
33	Paper Klip no 1	4	Pak	2.500,00	10.000,00
34	Paper Klip no 5	2	Pak	5.000,00	10.000,00
35	Plakban Hitam Kecil	1	Buah	9.500,00	9.500,00
36	Isolasi Bening	1	Buah	5.000,00	5.000,00
37	Isolasi Besar	1	buah	10.000,00	10.000,00
38	Isi Staples Besar	2	Pak	50.000,00	100.000,00



No	Nama Barang	Banyaknya		Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
39	Isi Staples Kecil	4	Pak	25.000,00	100.000,00
40	Block Note	15	buah	5.500,00	82.500,00
41	Bollpoint Pentel	3	buah	95.000,00	285.000,00
42	Bollpoint Pilot	180	buah	2.500,00	450.000,00
43	Bollpoint Faster	177	buah	2.500,00	442.500,00
					2.682.700,00

3) Kertas dan Cover Rp.2.600.000,00

Saldo awal Saldo awal persediaan kertas dan cover sebesar Rp.996.000,00 ditambah Pembelian selama tahun 2024 sebesar Rp.11.812.000,00, dikurangi pemakaian kertas dan cover selama tahun 2024 sebesar Rp.10.208.000,00 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp.2.600.000,00. dengan rincian saldo akhir sebagai berikut:

Tabel 64. Persediaan Kertas dan Cover Tahun 2024

No.	Nama Barang	Banyaknya		Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Kertas HVS 70 gr folio	31	Rim	64.000,00	1.984.000,00
2	Kertas HVS 70 gr folio Warna	7	Rim	85.000,00	595.000,00
3	Kertas Faximile	1	Rol	21.000,00	21.000,00
					2.600.000,00

4) Bahan Cetak Rp.1.067.300,00

Saldo awal persediaan bahan cetak sebesar Rp.621.800,00 ditambah pembelian selama tahun 2024 sebesar Rp.52.751.550,00 dikurangi pemakaian bahan cetak selama tahun 2024 sebesar Rp.52.306.050,00 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp.1.067.300,00. dengan rincian saldo akhir sebagai berikut:

Tabel 65. Persediaan Bahan Cetak Tahun 2024

No.	Nama Barang	Banyaknya		Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	A2 Cetak NCR rangkap 4	4	rim	24.200,00	96.800,00
2	Cetak A2 Polos	2	rim	89.100,00	178.200,00
3	Blangko Disposisi	17	rim	19.800,00	336.600,00
4	Kartu Kendali	39	rim	6.100,00	237.900,00
5	A II Rangkap 3	11	rim	19.800,00	217.800,00
					1.067.300,00

5) Bahan Komputer Rp.1.131.500,00

Saldo awal persediaan Bahan Komputer sebesar Rp.1.131.500,00 ditambah pembelian selama tahun 2024 sebesar



Rp.3.669.300,00 dikurangi pemakaian Bahan Komputer selama tahun 2024 sebesar Rp.2.537.800,00 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp.1.131.500,00. dengan rincian saldo akhir sebagai berikut:

Tabel 66. Persediaan Bahan Komputer Tahun 2024

No.	Nama Barang	Banyaknya		Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Brother Black Toner	2	botol	302.700,00	605.400,00
2	Tinta Blueprint Canon	2	botol	51.100,00	102.200,00
3	Tinta Printer Epson	3	botol	41.300,00	423.900,00
					1.131.500,00

6) Alat Listrik Rp.1.270.800,00

Saldo awal persediaan alat listrik sebesar Rp.534.100,00 ditambah pembelian selama tahun 2024 sebesar Rp.5.920.300,00 dikurangi pemakaian alat listrik selama tahun 2024 sebesar Rp.5.183.600,00 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp.1.270.800,00. dengan rincian saldo akhir sebagai berikut:

Tabel 67. Persediaan Alat Listrik Tahun 2024

No.	Nama Barang	Banyaknya		Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Batu Alkaline AA	4	Buah	22.000,00	88.000,00
2	Lampu Esensial 18 W	3	Buah	55.000,00	165.000,00
3	Lampu Downlight 3 W	3	Buah	40.000,00	120.000,00
4	Lampu Esensial 23 W	2	Buah	75.000,00	150.000,00
5	Lampu Esensial 14 W	2	Buah	60.000,00	120.000,00
6	Lampu Downlight 5 W	4	Buah	60.500,00	242.000,00
7	Klem Kabel	23	Buah	2.000,00	46.000,00
8	Saklar Broco	2	Buah	23.900,00	47.800,00
9	Stop Kontak Tanam	2	Buah	26.000,00	52.000,00
10	Lampu Phillip 20 W	3	Buah	80.000,00	240.000,00
					1.270.800,00

7) Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp.1.270.800,00

Saldo awal persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp.0,00 ditambah pembelian selama tahun 2024 sebesar Rp.32.499.300,00 dikurangi pemakaian Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya selama tahun 2024 sebesar Rp.7.817.500,00 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp.970.100,00. dengan rincian saldo akhir sebagai berikut:

Tabel 68. Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Tahun 2024



No.	Nama Barang	Banyaknya		Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Kapur Barus	2	buah	20.200	60.600,00
2	Kain Lap Kaca	1	buah	26.000	26.000,00
3	Parfum Mobil	9	buah	32.300	290.700,00
4	Pewangi Kamar Mandi	8	buah	19.800	158.400,00
5	Pewangi Ruangan	10	buah	29.300	293.000,00
6	Sabut Asah	8	buah	4.000	32.000,00
7	Sabut Cuci Piring Kawat	3	buah	5.600	16.800,00
8	Sabut Spon	5	buah	5.600	28.000,00
9	Sikat Kawat	2	buah	32.300	64.600,00
					970.100,00

5.2.1.2 Aset Tetap

Rp.3.447.831.374,92

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai ini merupakan nilai Aset Tetap milik Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga per 31 Desember 2024 yang terinci menurut jenisnya untuk tahun 2024. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.3.447.831.374,92 (tiga milyar empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat koma sembilan puluh dua rupiah). Dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp.2.968.605.833,13 (dua milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga koma tiga belas rupiah), maka mengalami kenaikan sebesar Rp.479.225.541,79 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus empat puluh satu koma tujuh puluh sembilan rupiah) atau 16,41%.

Selain Mutasi penambahan selain berasal dari realisasi belanja modal tahun 2024 yang memenuhi kriteria sebagai aset, namun adapula mutasi pengurangan Mutasi aset keluar. Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 69. Aset Tetap Tahun 2024

ASET TETAP		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Naik/ Turun (Rp)
1.	Tanah	178.570.000,00	178.570.000,00	0,00
2.	Peralatan dan Mesin	2.444.169.867,00	1.860.728.867,00	583.441.000,00
3.	Gedung dan Bangunan	3.849.121.850,00	3.288.887.455,00	616.680.143,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	96.602.300,00	87.800.000,00	8.802.300,00
5.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	98.504.000,00	98.504.000,00	0,00



ASET TETAP		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Naik/ Turun (Rp)
7.	Akumulasi Penyusutan	(3.219.136.642,08)	(2.545.884.488,87)	(674.381.068,17)
	Jumlah	3.447.831.374,92	2.968.605.833,13	534.542.374,83

Penjelasan rincian aset tetap adalah sebagai berikut:

5.2.1.1.1 Tanah

Rp.178.570.000,00

Aset Tanah pada Dinas Koperasi & UKM per 31 Desember 2024 sebesar Rp.178.570.000,00 naik sebesar Rp.0,00 atau 0% dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 178.570.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 70. Aset Tanah Tahun 2024

Tanah Menurut Pemanfaatannya Dan Lokasi		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Naik/ Turun (Rp)
1	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	106.470.000,00	106.470.000,00	0,00
2	Tanah Pertanian	72.100.000,00	72.100.000,00	0,00
	Jumlah	178.570.000,00	178.570.000,00	0,00

5.2.1.1.2 Peralatan dan Mesin

Rp.2.444.169.867,00

Aset Peralatan dan Mesin pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp.2.444.169.867,00 naik sebesar Rp.583.441.000,00 atau 31,36 % dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.860.728.867,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 71. Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2024

No	Peralatan dan Mesin	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Alat Besar	50.355.000,00	50.355.000,00	0,00
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.387.039.868,00	913.388.868,00	473.651.000,00
3	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	24.472.492,00	24.472.492,00	0,00
4	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	565.678.519,45	497.978.519,45	67.700.000,00
5	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	15.955.000,00	8.155.000,00	7.800.000,00



6	Alat Laboratorium	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
7	Komputer	399.668.987,55	365.378.987,55	34.290.000,00
	Jumlah	2.444.169.867,00	1,860,728,867.00	583.441.000,00

Rincian Penjelasan atas Kenaikan dan Penurunan Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

a) Alat Angkutan Darat Bermotor Rp.473.651.000,00

Alat Angkutan Darat Bermotor per 31 Desember 2023 sebesar Rp.913.388.868,00 ditambah Mutasi masuk sebesar Rp.473.651.000,00 sehingga alat angkutan darat bermotor per 31 Desember 2024 sebesar Rp.1.387.039.868,00 dengan rincian saldo akhir sebagai berikut:

Tabel 72. Alat Angkutan Darat Bermotor Tahun 2024

No.	Alat Angkutan Darat Bermotor	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Keterangan
1	Mutasi Masuk Kendaraan Dinas Mitsubishi Pajero Sport Nopol H 1242 XB	448.682.000,00	0,00	Mutasi Aset Masuk dari Sekretariat Daerah Berita Acara Nomor 028/0284 tanggal 19 Februari 2024
2	Mutasi Masuk Kendaraan Dinas Honda Revo Nopol H 6368 XB	11.144.000,00	0,00	Mutasi Aset Masuk dari Disperinaker Berita Acara Nomor 028/1572 tanggal 15 Agustus 2024
3	Mutasi Masuk Kendaraan Dinas Honda Revo Nopol H 6293 XB	13.825.000,00	0,00	
		473.651.000,00	0,00	

b) Alat Kantor Dan Rumah Tangga Rp. 67.700.000,00

Alat Kantor Dan Rumah Tangga per 31 Desember 2023 sebesar Rp.497.978.519,45 ditambah Pengadaan / Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga sebesar Rp.67.700.000,00 sehingga Alat Kantor Dan Rumah Tangga per 31 Desember 2024 sebesar Rp.565.678.519,45 dengan rincian saldo akhir sebagai berikut:

Tabel 73. Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga Tahun 2024

No.	Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Keterangan
1	Belanja Modal Mebel (4 unit Kursi Tunggu)	7.600.000,00	0,00	-
2	Belanja Modal Mebel (6 unit Rak Buku 1 sisi)	18.300.000,00	0,00	



No.	Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Keterangan
3	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (2 unit Dispenser)	5.700.000,00	0,00	
4	Belanja Modal Alat Pembersih (1 unit Mesin Potong Rumput)	2.800.000,00	0,00	
5	Belanja Modal Alat Pendingin (1 unit AC Split 1.5 PK)	9.300.000,00	0,00	
6	Belanja Modal Alat Pendingin (2 unit AC Split 2 PK)	24.000.000,00	0,00	
		67.700.000,00	0,00	

c) Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar Rp.7.800.000,00

Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp.8.155.000,00 ditambah Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar Rp.7.800.000,00 sehingga komputer per 31 Desember 2024 sebesar Rp.15.955.000,00 dengan rincian saldo akhir sebagai berikut:

Tabel 74. Belanja Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar Tahun 2024

No.	Belanja Modal Alat Studio	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Keterangan
1	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film (1 unit Kamera Digital)	7.800.000,00	0,00	-
		7.800.000,00	0,00	

d) Komputer Rp. 34.290.000,00

Komputer per 31 Desember 2023 sebesar Rp.365.378.987,55 ditambah Belanja Modal Komputer Unit Rp.34.290.000,00 sehingga komputer per 31 Desember 2024 sebesar Rp.399.668.987,55 dengan rincian saldo akhir sebagai berikut:

Tabel 75. Belanja Komputer unit Tahun 2024

No.	Belanja Modal Komputer unit	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Keterangan
1	Belanja Modal Personal Komputer (3 unit Laptop)	34.290.000,00	0,00	-
		34.290.000,00	0,00	



5.2.1.1.3 Gedung dan Bangunan

Rp. 3.849.121.850,00

Aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp.3.849.121.850,00 naik sebesar Rp.560.234.395,00 atau 17,03 % dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.3.288.887.455,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 76. Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2024

No	Gedung dan Bangunan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Naik/ Turun (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor	3.849.121.850,00	3.288.887.455,00	560.234.395,00
	Jumlah	3.849.121.850,00	3.288.887.455,00	560.234.395,00

Rincian Kenaikan Aset Gedung dan Bangunan sebagai berikut :

Tabel 77. Belanja Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2024

No	Uraian	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Keterangan
1.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum (Pengadaan Tahun 2024)	16.301.881,00	0,00	
2.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pengadaan Tahun 2024)	196.103.000,00	0,00	
3.	Reklasifikasi Bangunan Fasilitas Umum ke Bangunan Gedung Instalasi (MCK)	54.733.557,00	0,00	
4.	Reklasifikasi Bangunan Fasilitas Umum ke Bangunan Gedung Tempat Ibadah	28.798.957,00	0,00	
7.	Reklasifikasi Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor ke	74.997.000,00	0,00	
8.	Belanja Modal Pagar	189.300.000,00	0,00	
	Jumlah	560.234.395,00	0,00	

5.2.1.1.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp.96.602.300,00

Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp.96.602.300,00 naik sebesar Rp.8.802.300,00 atau 10,03% dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.87.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 78. Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024

No	Gedung dan Bangunan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Naik/ Turun (Rp)
1	Bangunan Air	29.301.845,00	29.301.845,00	0,00
2	Instalasi	58.498.155,00	58.498.155,00	0,00
3	Jaringan	8.802.300,00	0,00	8.802.300,00
	Jumlah	96.602.300,00	87.800.000,00	8.802.300,00

Rincian Kenaikan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagai berikut :

Tabel 79. Belanja Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024

No	Uraian	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Keterangan
1.	Reklasifikasi Bangunan Fasilitas Umum ke Jaringan Pembawa	8.802.300,00	0,00	
	Jumlah	8.802.300,00	0,00	

5.2.1.1.5 Aset Tetap Lainnya

Rp.0,00

Jumlah aset Tetap Lainnya pada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).set Tetap Lainnya.

5.2.1.1.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Rp. 98.504.000,00

Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp.98.504.000,00 naik sebesar Rp.0,00 atau 0% dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.98.504.000,00 dengan rincian sebagai berikut::

Tabel 80. Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024

No.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Ket
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan (Sentral UKM)	98.504.000,00	98.504.000,00	-
	Jumlah	98.504.000,00	98.504.000,00	-

5.2.1.1.7 Akumulasi Penyusutan Aset

(Rp.3.219.136.642,08)

Akumulasi Penyusutan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah per 31 Desember 2024 sebesar (Rp.3.219.136.642,08) naik sebesar Rp.673.252.153,21 atau 26,44% dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp.2.545.884.488,87) dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 81. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2024

Golongan Aset Tetap	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Naik/ Turun (Rp)
Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.256.517.477,92)	(1.652.406.892,25)	(604.110.585,67)
Penyusutan Gedung dan Bangunan	(948.408.231,27)	(881.879.660,88)	(66.528.570,39)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	(14.210.932,89)	(11.597.935,74)	(2.612.997,15)
Total Penyusutan Aset Tetap	(3.219.136.642,08)	(2.545.884.488,87)	(673.252.153,21)

a) **Penyusutan Peralatan dan Mesin**

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar (Rp.1.652.406.892,25) ditambah beban penyusutan tahun 2024 sebesar (Rp.130.459.585,67), ditambah akumulasi penyusutan atas adanya mutasi masuk aset antar OPD sebesar (Rp.473.651.000,00) sehingga Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar (Rp.2.256.517.477,92).

Tabel 82. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin adanya mutasi aset Tahun 2024

No.	Penyusutan Peralatan dan Mesin	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Keterangan
1	Akumulasi Penyusutan Kendaraan Dinas Mitsubishi Pajero Sport Nopol H 1242 XB	(448.682.000,00)	0,00	Mutasi Aset Masuk dari Sekretariat Daerah Berita Acara Nomor 028/0284 tanggal 19 Februari 2024
2	Akumulasi Penyusutan Kendaraan Dinas Honda Revo Nopol H 6368 XB	(11.144.000,00)	0,00	Mutasi Aset Masuk dari Disperinaker Berita Acara Nomor 028/1572 tanggal 15 Agustus 2024
3	Akumulasi Penyusutan Kendaraan Dinas Honda Revo Nopol H 6293 XB	(13.825.000,00)	0,00	
4	Beban penyusutan tahun 2024	(130.459.585,67)	0,00	
		(604.110.585,67)	0,00	

b) **Penyusutan Gedung dan Bangunan**

Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp.881.879.660,88) ditambah beban penyusutan tahun 2024 sebesar (Rp.66.528.570,67), dikurangi Koreksi Implementasi E-BMD atas koreksi desimal akumulasi penyusutan 2023 atas Bangunan Gedung Tempat Ibadah sebesar Rp.0,28 sehingga Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp.948.408.231,27)



Tabel 83. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2024

No.	Penyusutan Gedung dan Bangunan	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Keterangan
1	Beban penyusutan tahun 2024	(66.528.570,67)	0,00	
2	Koreksi Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	0,00	(0,28)	Koreksi Implementasi E-BMD atas koreksi desimal akumulasi penyusutan 2023 atas Bangunan Gedung Tempat Ibadah
		(66.528.570,39)	(0,28)	

c) **Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan**

Akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp.11.597.935,74) ditambah beban penyusutan tahun 2024 sebesar (Rp.2.612.997,15), sehingga Akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp.14.210.932,89).

Tabel 84. Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2024

No.	Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Keterangan
1	Beban penyusutan tahun 2024	(2.612.997,15)	0,00	
		(2.612.997,15)	(0,0)	

5.2.1.3 Dana Cadangan Rp.0,00

Dinas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tidak memiliki Dana Cadangan

5.2.1.4 Aset Lainnya Rp.149.655.611,45

Aset Lainnya pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp.149.655.611,45 turun sebesar Rp.6.971.677,08 atau 4,45% dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.156.627.288,53 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 85. Aset Lainnya Tahun 2024

Golongan Aset Lainnya	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Naik/ Turun (Rp)
Aset Tak Berwujud	291.854.000,00	255.718.000,00	36.136.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(193.983.593,75)	(150.875.916,67)	(43.107.677,08)
Aset Lain – Lain	51.785.205,20	51.785.205,20	0,00
Total Aset Lainnya	149.655.611,45	156.627.288,53	(6.971.677,08)



Penjelasan rincian Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

5.2.1.4.1 Aset Tak Berwujud **Rp.291.854.000,00**

Saldo Aset Tak Berwujud pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp.291.854.000,00 naik sebesar Rp.36.136.000,00 atau naik 14,13 % dibanding dengan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.255.718.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 86. Aset Tak Berwujud

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)
Reklasifikasi Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus ke Software (Pengembangan Aplikasi Pintar UMKM Salatiga)	36.136.000,00	0,00
Total	36.136.000,00	0,00

5.2.1.4.2 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud **(Rp.193.983.593,75)**

Pemerintah Kota Salatiga menerapkan amortisasi aset tak berwujud dengan menggunakan metode garis lurus. Saldo Amortisasi Aset Tak Berwujud pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah per 31 Desember 2022 sebesar (Rp.150.875.916,67) ditambah Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar (Rp.32.623.468,75) Ditambah Koreksi Implementasi E-BMD atas koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software sebesar (Rp.10.484.208,33) sehingga Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp.193.983.593,75).

5.2.1.4.3 Aset Lain Lain **Rp.51.785.205,20**

Saldo Aset Lain-lain pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp.51.785.205,20 naik sebesar Rp.0,00 atau 0,00 % dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.51.785.205,20 merupakan barang rusak dan tidak digunakan untuk aktifitas operasional serta dalam proses penghapusan.

5.2.1.5. Properti Investasi **Rp. 1.597.985.357,80**

Properti Investasi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp.1.597.985.357,80 naik sebesar Rp. 29.943.188,04 atau 1,91% dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.568.042.169,76 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 87. Aset Properti Investasi Tahun 2024

No	Properti Investasi	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Naik/ Turun (Rp)
1	Properti Investasi Tanah	299.359.920,00	299.359.920,00	0,00



2	Properti Investasi Gedung Dan Bangunan	1.408.228.948,00	1.351.783.200,00	56.445.748,00
3	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(109.603.510,20)	(83.100.950,24)	(26.502.559,96)
	Jumlah	1.597.985.357,80	1.568.042.169,76	(29.943.188,04)

5.2.1.5.1 Properti Investasi Tanah

Rp. 299.359.920,00

Properti Investasi Tanah pada Dinas Koperasi & UKM per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 299.359.920,00 naik sebesar Rp.0,00 atau 0% dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.299.359.920,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 89. Aset Properti Investasi Tanah Tahun 2024

Tanah Menurut Pemanfaatannya Dan Lokasi		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Naik/ Turun (Rp)
1	Tanah Untuk Bangunan Ged.Perdagangan/Perusahaan	35.314.920,00	35.314.920,00	0,00
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	68.625.000,00	68.625.000,00	0,00
3	Tanah Bangunan Tempat Tinggal	113.220.000,00	113.220.000,00	0,00
4	Tanah Pertanian	82.200.000,00	82.200.000,00	0,00
	Jumlah	299.359.920,00	299.359.920,00	0,00

5.2.1.5.2 Properti Investasi Gedung Dan Bangunan

Rp.1.408.228.948,00

Properti Investasi Gedung Dan Bangunan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp.1.408.228.948,00 naik sebesar Rp. 56.445.748,00 atau 4,18 % dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.351.783.200 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 0. Aset Properti Investasi Gedung Dan Bangunan Tahun 2024

No	Properti Investasi Gedung Dan Bangunan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Naik/ Turun (Rp)
1	Bangunan Gedung Pertokoan	1.408.228.948,00	1.351.783.200,00	56.445.748,00
	Jumlah	1.408.228.948,00	1.351.783.200,00	56.445.748,00



Rincian Kenaikan Properti Investasi Gedung Dan Bangunan sebagai berikut :

Tabel 91. Properti Investasi Gedung Dan Bangunan Tahun 2024

No	Uraian	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Keterangan
1.	Jurnal Reklasifikasi Belanja Bangunan Fasilitas Umum ke Properti Investasi-Gedung dan Bangunan	56.445.748,00	0,00	
	Jumlah	56.445.748,00	0,00	

5.2.1.5.3 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi (Rp.109.603.510,20)

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2023 sebesar (Rp.83.100.950,24) ditambah beban penyusutan tahun 2024 sebesar (Rp.26.502.559,96) sehingga Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebesar (Rp.109.603.510,20)

5.2.2 Kewajiban Rp.833.402,00

Kewajiban pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp.833.402,00 yang terdiri kewajiban jangka pendek senilai Rp.833.402,00 dan kewajiban jangka panjang Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek Rp. 833.402,00

Nilai kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp.833.402,00 (delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 92. Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2024

No	Jenis Jasa	Kewajiban Tahun 2024 (Rp.)
1	Konsumsi Telepon Desember 2024	26.310,00
2	Konsumsi air Desember 2024	85.800,00
3	Konsumsi listrik Desember 2024	721.292,00
5.2.2.2	Jumlah	833.402,00

Kewajiban Jangka Panjang Rp.0,00

Nilai kewajiban jangka panjang pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0,00.

5.2.3 Ekuitas Rp.5.228.449.237,67

Saldo Awal ekuitas per 1 Januari 2024 adalah Rp.5.285.124.766,11 (lima milyar dua ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh enam koma sebelas rupiah). Saldo akhir ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp.5.228.449.237,67 (lima milyar dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tujuh koma enam puluh tujuh rupiah).



Ekuitas merupakan jumlah kekayaan bersih pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga, yakni selisih antara nilai Aset dan Kewajiban, jumlah aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp.5.229.282.639,67 dikurangi kewajiban Rp.833.402,00 sehingga diperoleh Ekuitas sebesar Rp.5.228.449.237,67.

5.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode. Laporan Operasional Dinas Koperasi UKM, Kota Salatiga menyajikan:

- a. Pendapatan-LO
- b. Beban
- c. Surplus/defisit dari Operasi
- d. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional
- e. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa
- f. Pos luar biasa
- g. Surplus/deficit-LO

Pos-Pos Laporan Operasional menggambarkan Pendapatan dan Beban Dinas Koperasi, UKM yang berasal dari Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Defisit-LO yang dihasilkan selama Tahun Anggaran 2024 sebesar(Rp.6.576.246.453,04).

5.3.1 Kegiatan Operasional

5.3.1.1 Pendapatan LO

Rp.0,00

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga memiliki Pendapatan Rp.0,00 (nol rupiah) sebab tidak terdapat transaksi yang menghasilkan pendapatan .

5.3.1.2 Beban

Rp.6.522.979.689,91

Beban yang dimiliki Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga selama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.6.522.979.689,91 (enam milyar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh satu rupiah) Dibandingkan tahun 2023, Beban Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga sebesar Rp.6.628.368.504,04 (enam milyar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat koma empat rupiah) Mengalami penurunan sebesar Rp.105.388.814,13 (seratus lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat belas koma tiga belas rupiah) atau sebesar 1.59 %. Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 93. Beban Tahun 2024



Nama Beban	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Naik/ Turun (Rp)
Beban Pegawai	3.317.318.341,00	2.961.552.851,00	355.765.490,00
Beban Persediaan	712.230.410,00	1.526.274.021,00	(814.043.611,00)
Beban Jasa	1.442.310.931,71	1.483.634.566,14	(41.323.634,43)
Beban Pemeliharaan	200.245.641,00	151.248.250,00	48.997.391,00
Beban Perjalanan Dinas	592.147.184,00	260.039.399,00	332.107.785,00
Beban Bunga	0,00	293.750,00	(293.750,00)
Beban Penyusutan	258.727.182,20	245.325.666,90	13.919.344,78
Jumlah	6.522.979.689,91	6.628.368.504,04	(105.388.814,13)

5.3.1.2.1 Beban Pegawai

Rp. 3.317.318.341,00

Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp.3.317.318.341,00 (tiga milyar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) mengalami penurunan sebesar Rp.355.765.490,00 (tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) atau 12,01% dibandingkan dengan beban pegawai tahun 2023 sebesar Rp. 2.961.552.851,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah)

Rincian beban pegawai tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 94. Beban Pegawai Tahun 2024

Beban Pegawai		Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Naik/ Turun (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.714.781.504,00	1.476.650.590,00	238.130.914,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.582.536.837,00	1.435.404.261,00	147.132.576,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	20.000.000,00	49.498.000,00	(29.498.000,00)
Total Beban Pegawai		3.317.318.341,00	2.961.552.851,00	355.765.490,00

5.3.1.2.2 Beban Persediaan

Rp. 712.230.410,00

Beban barang tahun 2024 sebesar Rp.712.230.410,00 (tujuh ratus dua belas juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus sepuluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 95. Beban Persediaan Tahun 2024

Uraian		Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Naik/ Turun (Rp)
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	170.000,00	0,00	170.000,00
2	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	76.175.160,00	55.123.321,00	21.051.839,00
3	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	1.230.000,00	2.220.000,00	-990.000,00
4	Beban Bahan-Bahan Lainnya	14.610.850,00	4.645.600,00	9.965.250,00
5	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	4.330.000,00		4.330.000,00
6	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	7.040.000,00	8.646.000,00	(1.606.000,00)
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.690.500,00	11.936.200,00	(245.700,00)
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.208.000,00	12.903.700,00	(2.695.700,00)
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	52.306.050,00	65.481.000,00	(13.174.950,00)
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	3.030.000,00	3.020.000,00	10.000,00
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.537.800,00	2.479.800,00	58.000,00
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	0,00	115.550,00	(115.550,00)
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.183.600,00	4.784.900,00	398.700,00
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	7.817.500,00	0,00	7.817.500,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	31.529.200,00	3.602.350,00	27.926.850,00
16	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	195.008.750,00	1.229.860.600,00	(1.034.851.850,00)
17	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	289.363.000,00	121.455.000,00	167.908.000,00
	Jumlah	712.230.410,00	1.526.274.021,00	(814.043.611,00)

5.3.1.2.3 Beban Jasa

Rp.1.442.310.931,71



Beban jasa sebesar Rp. 1.442.310.931,71 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh satu rupiah). Rincian Beban Jasa tersebut dalam tabel di bawah ini:

Tabel 96. Beban Jasa Tahun 2024

	Beban Jasa	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Naik/ Turun (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	652.249.849,00	318.844.512,00	333.405.337,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	29.160.082,71	24.002.054,14	5.158.028,57
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	188.926.000,00	52.840.000,00	136.086.000,00
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	297.325.000,00	146.682.000,00	150.643.000,00
5	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	17.316.000,00	(17.316.000,00)
6	Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	0,00	923.950.000,00	(923.950.000,00)
7	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	274.650.000,00	0,00	274.650.000,00
	Jumlah Beban Jasa	1.442.310.931,71	1.483.634.566,14	(41.323.634,43)

5.3.1.2.4 Beban Pemeliharaan

Rp.200.245.641,00

Beban Pemeliharaan pada tahun 2024 sebesar Rp.200.245.641,00 (dua ratus juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus empat puluh satu rupiah). Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 97. Beban Pemeliharaan Tahun 2024

	Beban Pemeliharaan	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Naik/ Turun (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57.601.700,00	40.900.500,00	16.701.200,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	142.643.941,00	110.347.750,00	32.296.191,00
	Jumlah Beban Pemeliharaan	200.245.641,00	151.248.250,00	48.997.391,00

5.3.1.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Rp.592.147.184,00

Beban Perjalanan Dinas pada tahun 2024 sebesar Rp.592.147.184,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus delapan puluh empat rupiah). Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:



Tabel 98. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024

Beban Perjalanan Dinas		Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Naik/ Turun (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	286.567.184,00	165.164.399,00	121.402.785,00
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	195.700.000,00	94.875.000,00	100.825.000,00
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	109.880.000,00	0,00	109.880.000,00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas		592.147.184,00	260.039.399,00	332.107.785,00

5.3.1.2.6 Beban Penyusutan

Rp.258.727.182,20

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2024 sebesar Rp.258.727.182,20 (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua koma dua rupiah). Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 99. Beban barang dan Jasa Tahun 2024

Beban Penyusutan dan Amortisasi		Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Naik/ Turun (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	130.459.585,67	115.969.371,36	14.490.214,31
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	66.528.570,67	82.521.291,72	(14.863.806,09)
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.612.997,15	2.319.587,15	293.410,00
4	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	32.623.468,75	44.515.416,67	(11.891.947,92)
5	Beban Penyusutan Properti Investasi	26.502.559,96	0,00	25.891.474,48
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi		258.727.182,20	245.325.666,90	13.401.515,30

5.3.2 Kegiatan Non Operasional

(Rp.587.757.178,05)

Surplus/Defisit-LO dari kegiatan non operasional sebesar (Rp.587.757.178,05) (minus lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan koma lima rupiah), Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:



Tabel 100. Surplus/Defisit-LO dari kegiatan non operasional Tahun 2024

Surplus/Defisit-LO dari kegiatan non operasional		Realisasi 2024 (Rp)	Keterangan
1	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,28	Koreksi Implementasi E-BMD atas koreksi desimal akumulasi penyusutan 2023 Bangunan Gedung Tempat Ibadah
2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(10.484.208,33)	Koreksi Implementasi E-BMD atas koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software
3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	144.136.750,00	Cadangan Kerugian Piutang BLU
4	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	(523.796.420,00)	Pengembalian Kas Pengelolaan Dana Bergulir ke Kasda
5	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	(86.891.000,00)	Penyesuaian Piutang BLUD 2024 atas Angsuran Pokok periode Januari 2024 s.d Juni 2024
6	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	(42.023.100,00)	Penyesuaian Piutang BLUD 2024 atas Angsuran Pokok periode Juli 2024 s.d Desember 2024
7	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	(68.699.200,00)	Penyesuaian Piutang BLUD 2024 atas Rekonsiliasi atas piutang dana bergulir sampai dengan 31 Desember 2024
Jumlah Beban Pemeliharaan		(Rp.587.757.178,05)	

5.3.3 Pos Luar Biasa Rp.0,00

Surplus/Defisit-LO dari kegiatan pos luar biasa sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sebab tidak terdapat transaksi yang menghasilkan pendapatan ataupun beban dari pos luar biasa.

5.3.4 Surplus/Defisit LO (Rp.7.110.736.867,96)

Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah pada 31 Desember 2024 sebesar (Rp.7.110.736.867,96) (minus tujuh milyar seratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma sembilan puluh enam rupiah).

5.4 Penjelasan Pos-pos laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

5.4.1 Ekuitas Awal Rp.5.285.124.766,11

Ekuitas awal sebesar Rp. 5.285.124.766,11 merupakan saldo awal tahun 2024 yang terdiri dari aset lancar Rp. 594.295.476,69, aset tetap sejumlah Rp.2.968.605.833,13 dan aset lainnya Rp.156.627.288,53 ditambah Properti Investasi sejumlah Rp.1.568.042.169,76 dikurangi kewajiban sejumlah Rp.2.446.002,00. Untuk penjelasan ekuitas awal terdiri dari:



Tabel 101. Ekuitas Awal Tahun 2024

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
	ASET LANCAR		594.295.476,69
1	Kas Lainnya	525.471.420,00	
2	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.351.793.619,00	
3	Cadangan Kerugian Piutang	(1.298.317.069,00)	
4	Beban di Bayar di muka	12.393.306,69	
5	Persediaan	2.954.200,00	
	ASET TETAP		2.968.605.833,13
9	Tanah	178.570.000,00	
10	Peralatan dan Mesin	1.860.728.867,00	
11	Gedung dan Bangunan	3.288.887.455,00	
12	Jalan, Irigasi dan Jaringan	87.800.000,00	
13	Konstruksi Dalam Pengerjaan	98.504.000,00	
14	Akumulasi Penyusutan	(2.545.884.488,87)	
	ASET LAINNYA		156.627.288,53
15	Aset Tak Berwujud	255.718.000,00	
16	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(150.875.916,67)	
17	Aset Lain-lain	51.785.205,20	
	PROPERTI INVESTASI		1.568.042.169,76
18	Properti Investasi Tanah	299.359.920,00	
19	Properti Investasi Gedung Dan Bangunan	1.351.783.200,00	
20	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(83.100.950,24)	
	KEWAJIBAN		(2.446.002,00)
21	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	(2.446.002,00)	
	EKUITAS		5.285.124.766,11

5.4.2 Surplus/Defisit LO

(Rp.7.110.736.867,96)

Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada 31 Desember 2024 sebesar (Rp.7.110.736.867,96) (minus tujuh milyar seratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma sembilan puluh enam rupiah).



5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp.0,00

Penjelasan atas dampak kumulatif perubahan kebijakan dalam Pos Lain-Lain sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

5.4.4 Akun untuk Dikonsolidasikan Rp.7.054.579.169,00

Akun untuk Dikonsolidasikan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp.7.054.579.169,00 (tujuh milyar lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 102. kumulatif perubahan kebijakan Tahun 2024

No.	Uraian	Keterangan	Jumlah (Rp.)
1	RK PPKD	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	7.054.579.169,00
	Jumlah		7.054.579.169,00

5.4.5 Ekuitas Akhir Rp.5.228.967.067,15

Ekuitas Akhir Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp.5.228.967.067,15 (lima milyar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam puluh tujuh koma lima belas rupiah). Nilai tersebut berasal dari Ekuitas Awal tahun 2023 yang selanjutnya dipengaruhi oleh Surplus/Defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar yang terdiri dari Selisih Revaluasi Aset Tetap dan Lain-Lain serta dipengaruhi juga oleh RK PPKD (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), sebagai berikut:

Ekuitas Awal	Rp.	5.285.124.766,11
Pengurangan ekuitas		
Defisit-LO	Rp.	(7.110.736.867,96)
Penambahan Ekuitas		
KOREKSI EKUITAS - KAS	Rp.	
KOREKSI EKUITAS – PIUTANG	Rp.	
KOREKSI EKTS - ASET TTP ANTAR OPD	Rp.	
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	Rp.	<u>7.054.579.169,00</u>
Ekuitas Akhir	Rp.	5.228.967.067,15



BAB VI

INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

6.1 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

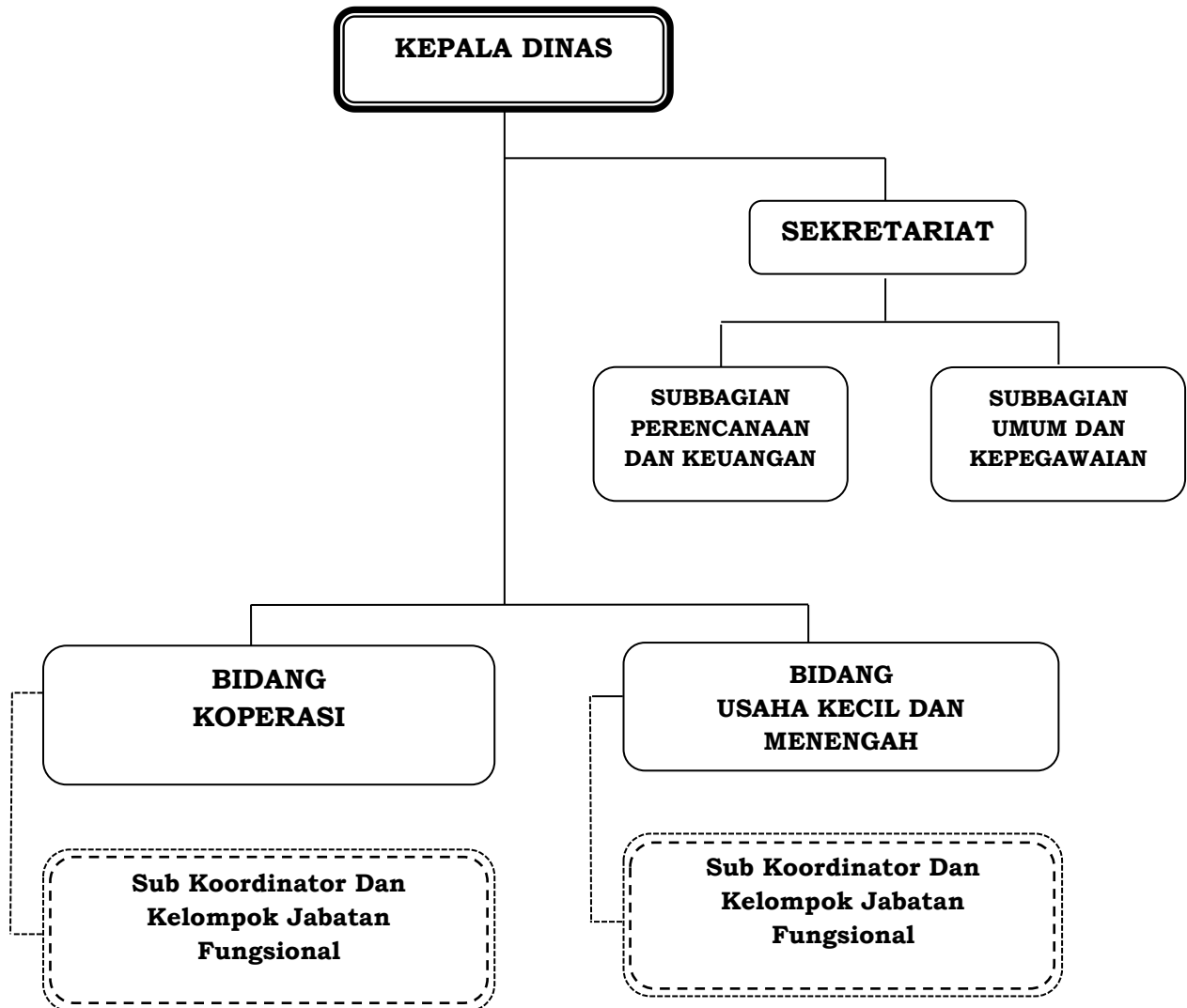
Dinas Koperasi, UKM Kota Salatiga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Koperasi, terdiri dari:
 - Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Sub Koordinator Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi;
 - b. Sub Koordinator Pengawasan Koperasi.
- d. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
 - Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Sub Koordinator Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro;
 - b. Sub Koordinator Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro.



Struktur Organisasi
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga





B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Salatiga Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 122 Tahun 2021 tentang tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
2. pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
3. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
4. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta pelayanan administratif Dinas dilingkup perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. pengoordinasian perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
2. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
4. pelayanan administratif Dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian sebagaimana disebut dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

3) Bidang Koperasi

Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sub urusan izin usaha simpan pinjam, sub urusan pengawasan dan pemeriksaan, sub urusan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi, sub urusan pendidikan dan pelatihan perkoperasian serta sub urusan pemberdayaan



dan perlindungan koperasi di lingkup kelembagaan dan pengembangan koperasi serta pengawasan koperasi.

Bidang Koperasi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi Bidang Koperasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Koperasi.

Sub Koordinator tersebut terdiri atas :

- a. Sub Koordinator Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi;
- b. Sub Koordinator Pengawasan Koperasi.

4) Bidang Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah sub urusan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro serta sub urusan pengembangan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro dilingkup pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro serta pengembangan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro.

Bidang Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi Bidang Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah. Sub Koordinator tersebut terdiri atas :

- c. Sub Koordinator Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro;
- d. Sub Koordinator Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro.

5) Kepegawaian

Pegawai Dinas terdiri atas:

- a. PNS yang merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional; dan
- b. PPPK yang merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Dinas.



Sedangkan jabatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga terdiri dari:

1. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara dengan jabatan eselon II/b, yang berfungsi memimpin dan memotivasi bawahan melalui kepeloporan keahlian profesional, analisis, rekomendasi kebijakan, kepemimpinan, manajemen, pengembangan kerjasama dengan instansi lain, keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik serta kode perilaku ASN.
2. Sekretaris merupakan jabatan administrator atau setara dengan jabatan eselon III/a, yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi Pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau setara dengan jabatan eselon III/b, yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi Pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau setara dengan jabatan eselon IV/a, yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
5. Staf merupakan jabatan pelaksana kegiatan, yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi Pemerintahan dan pembangunan.
6. Jabatan Fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

6) Gambaran Umum

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga di dukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 26 orang yang terdiri dari:

1. PNS = 21 orang
 2. PPPK = 2 orang
 3. Tenaga Non ASN = 8 orang
- Jumlah = 31 orang

Tabel 94. Rincian Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

No	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1	Pegawai Golongan IV	4
2	Pegawai Golongan III	14
3	Pegawai Golongan II	3
4	Pegawai Golongan I	-
5	PPPK	2
6	Non ASN	8
TOTAL		31



Tabel 95. Rincian ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1	SD	0
2	SLTP	0
3	SLTA	6
4	Diploma II	0
5	Diploma III	2
6	Sarjana (S1)/Diploma IV	12
7	Sarjana (S2)	2
8	Sarjana (S3)	1
		22

Tabel 96. Rincian PNS Berdasarkan Jumlah Pangkat Eselon/Struktur/Fungsional

No	PANGKAT	JUMLAH (ORANG)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	3
3	Eselon IV	5
4	Jabatan Pelaksana	13
	JUMLAH	21

Tabel 97. Nama Pejabat Eselon/Struktural

No	Nama Jabatan	Nama
1	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dr. Bayu Joko Mulyono, S.Sos., M.Si
2	Sekretaris	Ermi Asriati, SE, MM
3	Kepala Subagian Perencanaan dan Keuangan	Siska Sulistiani, SE
4	Kepala Subagian Umum dan Kepegawaian	Sri Rejeki Poersetyaningasih, SH
5	Kepala Bidang Koperasi	Sri Hartatik, SE
6	Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah	Sri Wisnu Hatmana, SE.Akt., M.Si

Tabel 98. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

No	Nama	Nama Jabatan
1	Ermin Wahyu Setyaningtyas, S.AB	Sub Koordinator Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi
2	Nuraini, SE	Sub Koordinator Pengawasan Koperasi
3	Achmad Alamul Huda, SE	Sub Koordinator Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro



6.2 Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

6.2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UKM merupakan kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Tujuan dan sasaran berdasarkan RPD 2023-2026 yang sesuai dengan Tupoksi Dinas Koperasi, UKM sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk.
Sasaran : 1. Meningkatnya jumlah koperasi aktif
2. Meningkatnya jumlah UKM

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi dan UKM beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini.



Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra
				Realisasi 2021	Target Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Meningkatnya jumlah koperasi aktif	Persentase koperasi aktif	%	70.00	70.00	70.56	71.11	71.67	72.22	72.22
	Meningkatnya jumlah UKM	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	96	96	96	96	96	96	96

6.2.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di bidang perekonomian sesuai visi dan misi RPJPD Kota Salatiga 2005-2025, diperlukan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

a) Strategi :

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kuantitas dan daya saing UMKM dan koperasi melalui penguatan kapasitas dan ketrampilan SDM, serta pengembangan kemitraan usaha dengan usaha besar
2. Menyelenggarakan dan mengikuti pameran
3. Menyelenggarakan pelatihan perkoperasian bagi anggota koperasi
4. Melakukan pengawasan dan penilaian kepatuhan koperasi
5. Melakukan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi
6. Mengadakan pelatihan manajerial dan digitalisasi bagi pengelola koperasi
7. Meningkatkan Akses permodalan bagi UMKM
8. Menyelenggarakan pelatihan perkoperasian bagi anggota koperasi

b) Kebijakan :

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan tahun 2023

Memperkuat Ekonomi Kerakyatan melalui UMKM, Industri Kecil dan Menengah untuk menciptakan daya saing.

b. Kebijakan tahun 2024

Peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang

c. Kebijakan tahun 2025

Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi.

d. Kebijakan tahun 2026

Penguatan kapasitas dan ketrampilan pelaku UMKM dan Koperasi, terutama dalam peningkatan akses pasar produk UKM dan anggota koperasi.

Pernyataan strategi dan kebijakan yang selaras dengan tujuan dan sasaran disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinkop Koperasi dan UKM Kota Salatiga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Meningkatnya jumlah koperasi aktif	Menyelenggarakan pelatihan perkoperasian bagi anggota koperasi	Mewujudkan pemulihan ekonomi kerakyatan dengan penguatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM, terutama
		Melakukan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Mengadakan pelatihan manajerial dan digitalisasi bagi pengelola koperasi	dalam tata kelola manajemen usaha
	Meningkatnya jumlah UKM	Meningkatkan Akses permodalan bagi UMKM	Memperkuat Ekonomi Kerakyatan melalui UMKM, Industri Kecil dan Menengah untuk menciptakan daya saing
		Meningkatkan kuantitas dan daya saing UMKM dan koperasi melalui penguatan kapasitas dan keterampilan SDM, serta pengembangan kemitraan usaha dengan usaha besar	
		Menyelenggarakan dan mengikuti pameran	

6.3 Informasi Non Keuangan Lainnya

Tidak ada informasi non keuangan lainnya



BAB VII

PENUTUP

Demikian penyusunan Laporan Keuangan Dinas Koperasi, UKM Kota Salatiga Tahun 2024 dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, sebagai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis, terstruktur untuk kepentingan Akuntabilitas, Manajemen, Transparansi dan Keseimbangan Antargenerasi (Intergenerational equity).

Laporan Keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disusun sebagai bentuk Pertanggungjawaban Kepala Dinas Koperasi, UKM dalam rangka mewujudkan Good Governance.

Laporan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna dan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Salatiga,
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH
KOTA SALATIGA

Dr. BAYU JOKO MULYONO, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19750402 200312 1 008